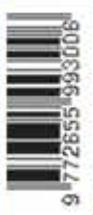


Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 61
Januari 2024



Menyetarakan Akses Digital

Melalui Tol Langit

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Helmi Fajar Andrianto

Redaktur Pelaksana:
Fahmie Trihatin J.

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Daoni Diani Hutabarat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Agung Windhi Prasetya
Adhi Sakti
Meita Pusparini
Adelia Nabiila Safira
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Desideramus Bitan

Fotografer:
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma
Paulinus Hardi Subiantoro

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi & Distribusi:
Sofia Wahdiati

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Meratakan Konektivitas Internet

Salam pembaca setia Majalah KominfoNext. Menyongsong awal tahun baru 2024, kami persembahkan Majalah KominfoNext edisi ke-61, edisi pertama tahun ini yang menyajikan perjalanan pembangunan konektivitas tanah air lewat program *base transceiver station* (BTS) 4G. Akhir Desember 2023 lalu, Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Komunikasi dan Informatika meresmikan pengoperasian BTS 4G di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kemkominfo, percepatan pembangunan konektivitas tanah air khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ini terus dilakukan, yang kemudian diakselerasi atas dasar arahan Presiden Joko Widodo pada 2020 lalu. Menkominfo menegaskan, ketersediaan konektivitas internet merupakan hak rakyat agar lebih mudah dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengapresiasi dukungan semua pihak yang ikut berperan dalam membantu percepatan pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo.

Upaya BAKTI Kominfo dalam penyediaan akses layanan telekomunikasi wilayah 3T juga dikupas tuntas dalam wawancara bersama Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, yang disajikan apik dalam rubrik Tokoh. Diharapkan, dengan hadirnya konektivitas internet, masyarakat dapat memanfaatkan internet secara bijak dan produktif, guna menghadirkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju.



Rhina Anita

• Kepala Biro Hubungan Masyarakat
• **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**

Dalam edisi ini rekan-rekan pembaca juga disuguhkan kisah inspiratif tentang donasi buku untuk masyarakat Pulau Ende. Edisi KoinfoNext kali ini juga mengulas secara khusus seputar perhelatan demokrasi 5 tahunan, Pemilihan Umum. Dalam rubrik "Pemilu Damai Pedia," kami membahas dukungan Kementerian Koinfo lewat pengembangan Sistem Informasi Etik yang bertujuan untuk memastikan integritas dan keamanan data pemilu.

SIETIK dirancang untuk mengamankan data pemilu dari upaya manipulasi dan kecurangan. Dengan adanya sistem ini, Koinfo dapat memastikan bahwa setiap tahap pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, terlindungi dari ancaman keamanan siber. Koinfo juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memonitor dan mengevaluasi keamanan sistem secara berkala. SIETIK memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu secara online, karena tersedia akses melalui website maupun aplikasi mobile.

Dukungan Koinfo juga hadir dalam bentuk monitoring kualitas telekomunikasi, Quality of Service (QoS). QoS memainkan peran vital dalam memastikan kelancaran aliran informasi antara pemilih, penyelenggara pemilu, dan pihak terkait. Koinfo bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk melakukan pengecekan QoS secara berkala guna menjamin bahwa jaringan telekomunikasi berfungsi optimal selama periode pemilu.

Rubrik Foto Esai seputar kampanye akan mengajak Anda untuk melihat momen-momen unik dalam upaya para kandidat mendulang simpati masyarakat.

Tak ketinggalan, kami juga menyuguhkan tulisan resensi buku dari sivitas Kementerian Koinfo. Dalam sorotan ini, Anda akan mendapati pandangan-pandangan tajam dan penuh makna terhadap karya-karya yang menjadi bacaan wajib para pembaca setia Majalah KoinfoNext.

Semoga edisi ke-61 ini tidak hanya menjadi sumber informasi terpercaya bagi rekan-rekan pembaca, tetapi juga menggugah semangat dan memberikan pandangan baru bagi rekan-rekan sekalian.

Selamat membaca!

Cover Story



Foto oleh: Zabur Karuru (LKBN Antara)

Pemenang III Anugerah Jurnalistik Koinfo 2023

Pekerja memeriksa 'compact mobile BTS' di Desa Golo Mori, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (4/5/2023). Sejumlah persiapan seperti penyediaan infrastruktur telekomunikasi, transportasi dan penataan taman serta infrastruktur lainnya itu bertujuan menyambut pergelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo.



Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh, di Government Office, Hanoi, Vietnam pada Jumat, 12 Januari 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Presiden RI dan PM Vietnam Tetapkan Target Baru Perdagangan Bilateral

Presiden Jokowi juga mengapresiasi kemitraan strategis kedua negara yang telah menghasilkan berbagai kerja sama konkret, antara lain nota kesepahaman kerja sama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditandatangani hari ini.

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh, di Government Office, Hanoi, Vietnam pada Jumat, 12 Januari 2024. Kedua pemimpin sepakat meningkatkan target baru perdagangan bilateral kedua negara setelah target sebesar USD10 miliar yang seharusnya dicapai 2023 telah berhasil dicapai pada tahun 2022.

"Saya yakin Yang Mulia sepakat untuk menetapkan target perdagangan di atas USD15 miliar untuk 2028 di mana perluasan akses pasar dan pengurangan hambatan perdagangan menjadi kunci," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi kemitraan strategis kedua negara yang telah menghasilkan berbagai kerja sama konkret, antara lain nota kesepahaman kerja sama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditandatangani hari ini.

"Ini sejalan dengan penguatan kemitraan bilateral yang memanfaatkan bonus demografi, digitalisasi, dan industri berteknologi tinggi untuk mencapai kemakmuran bersama," ujar Presiden.

Kerja sama selanjutnya yang dibahas kedua pemimpin negara adalah dalam bidang investasi. Presiden Jokowi mengapresiasi peningkatan investasi perusahaan Indonesia di Vietnam dan berharap PM Pham Minh Chinh terus mendorong terjadinya iklim investasi yang baik.

"Mohon dukungan Yang Mulia untuk terus mendorong iklim investasi yang mengutamakan aspek perlindungan investor sesuai kesepakatan kedua negara dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement," ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut meminta dukungan PM Pham Minh Chinh agar impor beras dari Vietnam berjalan lancar. Tidak hanya itu, Presiden juga ingin agar kerja sama pertanian semakin diperkuat melalui penelitian pengendalian mutu dan smart farming, mendorong implementasi MoU kerja sama perikanan, serta memberantas IUU Fishing bersama.

Sedangkan, terkait kerja sama di bidang energi terbarukan, Presiden Jokowi menyambut baik komitmen investasi VinFast senilai USD1,2 miliar untuk pembangunan ekosistem mobil listrik dan baterai Indonesia. Presiden pun berharap komitmen tersebut dapat mendorong kolaborasi antara negara di Asia Tenggara untuk mencapai kemandirian industri energi terbarukan.

Ini sejalan dengan penguatan kemitraan bilateral yang memanfaatkan bonus demografi, digitalisasi, dan industri berteknologi tinggi untuk mencapai kemakmuran bersama.

"Terakhir, terima kasih atas dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. ASEAN masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan krisis Myanmar. Untuk itu, Indonesia akan terus mendukung keketuaan Laos tahun ini," tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdi.



Presiden Joko Widodo meninjau Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 3 Januari 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan Melalui Dana Desa

Presiden menyebut hal tersebut dapat dilihat dari dana desa yang telah tersalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air.

Presiden Joko Widodo menegaskan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Presiden menyebut hal tersebut dapat dilihat dari dana desa yang telah tersalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air.

“Jangan keliru ini saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa—Rp539 triliun, *niku duit kathah sanget lo*—uang gede banget lo,” ucap Presiden dalam pertemuannya bersama para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara, yang digelar di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 3 Januari 2024.

Presiden menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya. Presiden memberi contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.

“*Airport niku gawe airport sedengan ngoten nggih* itu Rp2 triliun. *La niki* berarti *dadi kiro-kiro 250 airport gedhe*. *Bendungan niku* Rp1 triliun, Rp1,5 triliun berarti *dadi kira-kira 400 bendungan waduk* kalau dijadikan artinya uang itu gede sekali,” jelasnya.

Lebih lanjut, mengenai pembangunan jalan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350 ribu kilometer. Presiden menyebut jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.

“Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh tanah air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara berharap agar penggunaan dana desa kedepannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan

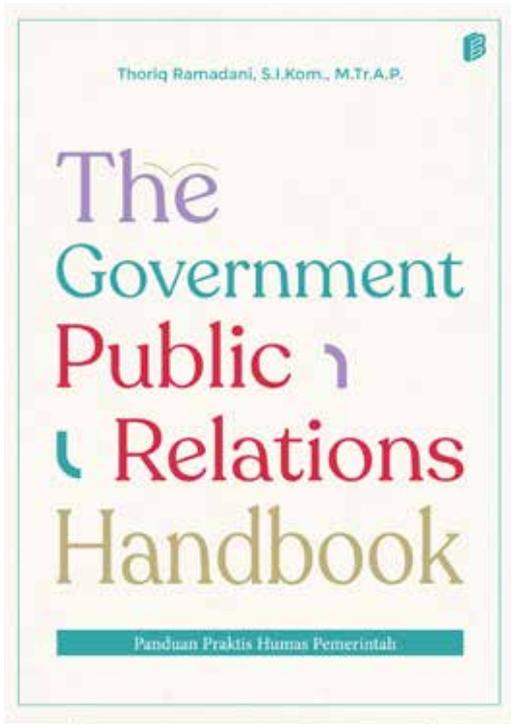
manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.

“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar *belonjone teng Jakarta*. *Ketok e luweh murah*, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Presiden menghimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah desa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing. “Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Agus Prasetyo Adi, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto.

**Biarkan
uang itu
beredar meskipun
harganya sedikit
lebih mahal tapi
uangnya beredar
di desa kita**



The Government Public Relations Handbook: Panduan Praktis Humas Pemerintah

Penulis : Thoriq Ramadani

Penerbit : Bintang Semesta Media

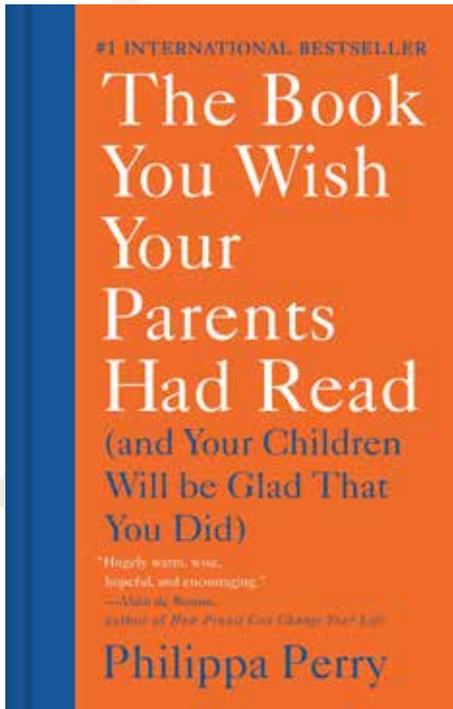
Buku "The Government Public Relations Handbook : Panduan Praktis Humas Pemerintah" memberikan gambaran apa saja yang dikerjakan oleh Humas Pemerintah di Indonesia. Mulai dari pemahaman *Government Public Relations*, tugas, fungsi, dan perannya, merencanakan strategi komunikasi, membangun *media relations*, mengomunikasikan kebijakan, dan membuat event. Tidak hanya itu saja, buku ini juga mengupas bagaimana *government public relations* mengelola konten *website*, memanfaatkan media sosial, memitigasi krisis, dan mengaudit komunikasi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi inspirasi, referensi, dan memperkaya khazanah, tidak hanya bagi humas pemerintah saja, namun juga bagi mahasiswa, akademisi, maupun pejabat di instansi, korporasi, media, dan siapa saja yang ingin mengetahui seluk beluk humas pemerintah. Buku ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Kominfo.



Perpustakaan Kementerian Kominfo

Gedung Belakang Lt. 1, Jl. Medan Merdeka Barat no. 9, Jakarta

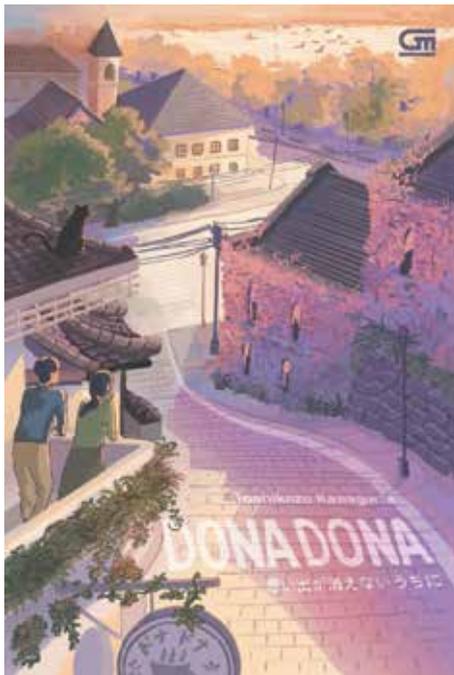


The Book You Wish Your Parents Had Read

Penulis : Philippa Perry

Penerbit : Renebook

Dalam buku ini, penulis mengingatkan kita terhadap hal-hal penting yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah hubungan terutama dalam lingkup *parenting*. Nasihat penulis yang bijak, penuh wawasan, aplikatif, dan tidak menghakimi ini merupakan inspirasi terpenting dalam menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang yang paling berarti dalam hidup kita. Buku ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Kominfo.



Dona Dona

Penulis : Toshikazu Kawaguchi

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Di sebuah lereng indah tak bernama di Hakodate, Hokkaido, berdiri Kafe Dona Dona yang menawarkan layanan istimewa kepada pengunjungnya, yaitu perjalanan melintasi waktu. Seperti di Funiculi Funicula yang ada di Tokyo, hal tersebut hanya dapat dilakukan jika berbagai peraturan yang merepotkan dipenuhi dan dengan secangkir kopi yang dituangkan oleh perempuan di Keluarga Tokita.

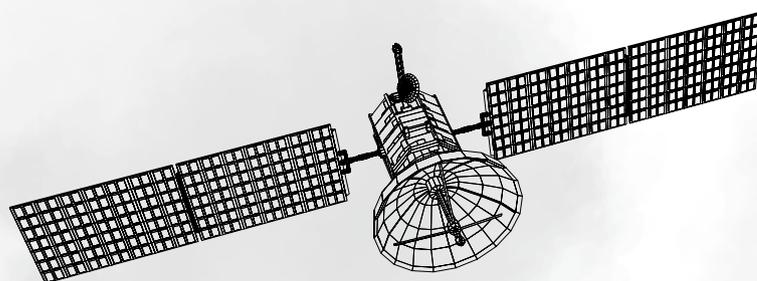
Dalam buku ini, diceritakan tokoh-tokoh yang ingin memutar waktu, di antaranya: (1) seorang wanita muda yang menyimpan dendam kepada orangtua yang menjadikannya yatim piatu kesepian, (2) seorang komedian yang kehilangan tujuan hidup setelah berhasil mewujudkan impian mending istrinya, (3) seorang adik

yang khawatir kakaknya takkan bisa tersenyum lagi setelah kepergiannya, dan (4) seorang pemuda yang tak mampu mengungkapkan cinta terpendam kepada sahabatnya. Mungkin perjalanan mereka hanya akan menyisakan kenangan, namun kehangatannya akan membekas dan pada akhirnya menumbuhkan tekad baru untuk menjalani hidup. Buku ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Kominfo (*offline*) dan Ruang Buku Kominfo (*online*).



Internet: **Satelit VS BTS 4G**

Halo SobatKom! Pernah kepikiran nggak, kalau SobatKom pake ponsel buat *browsing* itu, sumber internetnya dari mana? Menggunakan satelit enggak sih? Lalu, kalau ada satelit, kenapa semuanya *nggak* lewat satelit aja? Terus satelit buat apa? Kenapa harus pake satelit? Kenapa *nggak* bikin menara telekomunikasi pakai *base transceiver station* (BTS) 4G aja yang banyak?



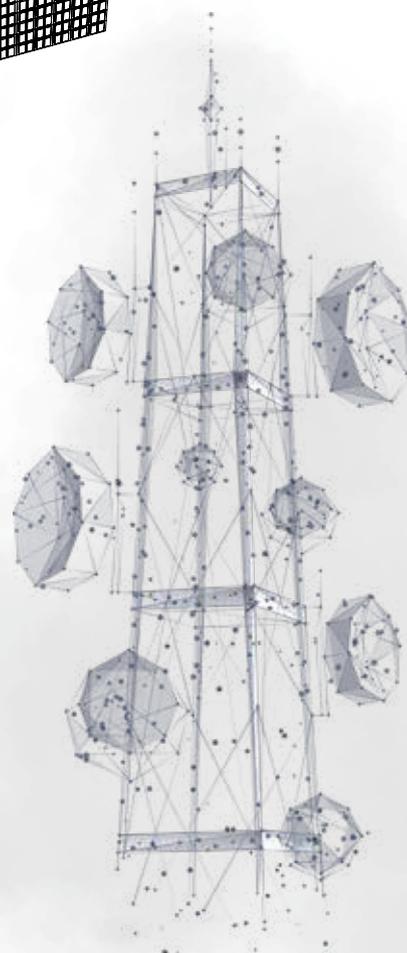
Jadi gini SobatKom, membangun BTS 4G itu ternyata *nggak* gampang dan juga membutuhkan akses ke BTS lain atau kabel serat optik untuk meneruskan data dari ponsel atau perangkat internet SobatKom. Belum lagi titik yang perlu dibangun BTS tersebut jumlahnya ribuan untuk bisa menyediakan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

Nah, kalau meluncurkan satelit, cukup satu kali meluncurkan lalu ribuan akses internet bisa diberikan dalam waktu relatif cepat. Setelah satelit diluncurkan ke orbitnya dan mulai operasional, membangun titik akses relatif jauh lebih mudah daripada membangun BTS 4G. Setelah satelit meluncur, perlu infrastruktur Very Small Aperture Terminal atau V-SAT yang kadang disebut antena parabola, untuk dapat mengakses internet. Karena cakupan layanan satelit yang luas, akses internet melalui satelit ini cocok untuk wilayah-wilayah yang sulit terjangkau.

Jika semudah itu, kenapa tidak menggunakan satelit saja?

Nah SobatKom, walaupun cakupannya luas, sayangnya satelit telekomunikasi jaraknya mencapai sekitar 35.785 km dari permukaan bumi. Setidaknya perlu lebih dari 0,239 detik untuk gelombang radio dikirim dari satu titik di bumi, mencapai satelit dan kembali lagi ke titik lain di bumi. Artinya, saat SobatKom main game online Valorant, klik tembak sekarang, ada jeda seperempat detik hingga karakter favoritmu benar-benar menembak. Atau SobatKom sudah menghindari ketika musuh memberikan ulti, tapi baru seperempat detik berikutnya karakter SobatKom bergerak, jadi kena deh.

Belum lagi biaya langganan internet satelit lebih mahal dibandingkan langganan seluler atau internet kabel. Dengan kecepatan yang sama,



mungkin pelanggan pribadi perlu membayar 3 hingga 10 kali lebih mahal dibandingkan internet melalui modem 4G atau melalui kabel serat optik. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan internet satelit pasti sudah menghitung-hitung biaya yang dikeluarkan dan kebutuhan mereka. Sementara kalau pemerintah sudah pasti mengutamakan pemerataan akses untuk daerah-daerah 3T yang sulit dijangkau.

Nah, menariknya, di beberapa lokasi yang sulit dibangun infrastruktur telekomunikasi tadi, beberapa BTS menggunakan satelit sebagai backhaul, atau dalam Bahasa Indonesia disebut pengatur jaringan. BTS ini akan berkomunikasi langsung dengan perangkat seluler SobatKom, tapi terhubung ke satelit agar terhubung dengan jaringan telekomunikasi utama dari penyedia telekomunikasi tersebut. Tapi tentunya latensi atau telat seperempat detik yang dibahas sebelumnya masih tetap terjadi.

Sumber :

<https://www.national-broadband.co.uk/satellite-or-4g-broadband>
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/49643/inilah-cara-kerja-satelit-internet-satria-1/0/satria>
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengalur_jaringan
<https://www.ceragon.com/what-is-backhaul>

5G Tidak Sekadar Internet Cepat

Semakin meluasnya penggunaan internet menuntut adanya konektivitas yang semakin cepat. Sekitar 25 tahun lalu, internet hanya diakses melalui komputer melalui koneksi telepon dengan konten yang berupa gambar dan teks. Saat ini perangkat ponsel yang kita genggam sudah bisa kita gunakan untuk mengakses konten video yang membutuhkan kecepatan koneksi internet yang cepat. Tidak hanya komputer dan ponsel, bahkan perangkat rumah tangga seperti lemari es atau penyedot debu pun membutuhkan akses internet.

Semakin tingginya kebutuhan terhadap koneksi internet yang cepat mendorong semakin berkembangnya teknologi nirkabel. Salah satu teknologi jaringan nirkabel yang berkembang adalah teknologi seluler. Jaringan seluler adalah

jaringan yang paling banyak digunakan untuk mengakses internet karena memiliki cakupan wilayah yang luas.

Pemerintah dan operator seluler saat ini telah membangun BTS untuk koneksi seluler dengan teknologi 4G. Namun saat ini sudah terdapat wilayah-wilayah yang dapat mengakses jaringan 5G. Apa sih yang membedakan jaringan seluler generasi kelima dengan generasi-generasi sebelumnya?

Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, tepatnya pada 1991, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai hadir Di Indonesia,

1G

- Diperkenalkan pada 1979
- Menggunakan sistem analog bernama AMPS
- Kecepatan maksimum 2,4 kbps
- Hanya dapat lakukan panggilan telepon
- Kualitas telepon buruk, boros baterai, dan tidak terenkripsi

2G

- Pertama hadir pada 1991
- Terdapat fitur SMS dan MMS
- Suara panggilan lebih jernih
- Kecepatan maksimum 473 kbps

IndonesiaBaik.id IndonesiaBaikID Riset: Rosi Okt. Grafis: Ananda Syaifulah

FMB GPR JURNAL DIALOG INDONESIA.GO.ID InfoPublik Indonesia Baik.id GPO KOMINFO newsroom

penggunaan ponsel mulai marak digunakan masyarakat pada tahun 2000-an seiring dengan harga yang semakin terjangkau. Pada saat itu, pengguna ponsel bisa menikmati akses telepon nirkabel dan pesan singkat atau SMS serta berselancar di internet ke situs-situs yang sederhana dan didesain untuk ditampilkan di ponsel.

Baru pada tahun 2001, dikenalkan jaringan seluler generasi ketiga atau 3G yang baru masuk ke Indonesia sekitar tahun 2006.

Indonesia baik.id

3G

- Dikenalkan pada **2001**
- Kecepatan hingga **5,76 mbps**
- Mulai terdapat **layanan internet**
 - browsing
 - pengiriman email
 - streaming video dan musik
 - video calling
 - berbagi data
 - teleconference

4G

- Diluncurkan pada 2009
- Lahirnya industri konten kreatif dan startup digital
- Berevolusi jadi LTE-Advanced kecepatannya 1 gbps
- Tersedia streaming video HD, game online tanpa lag, upload dan download singkat

IndonesiaBaik.id IndonesiaBaikID Riset Rosli Okt. Grafis Ananda Syaifulloh

FMD GDR JURNAL BEALOG INDONESIA GO.ID InfoPublik Indonesia baik.id GPR TV KOMINFO newsroom

dengan kecepatan yang memadai untuk digunakan berselancar di internet di Indonesia. Bermadankan teknologi ini, muncul ponsel-ponsel pintar yang dapat memaksimalkan manfaat jaringan seluler generasi ketiga ini seperti Blackberry, Apple, dan Android. Ponsel jenis ini tidak hanya bisa digunakan untuk telepon dan pesan singkat saja tetapi juga untuk penggunaan media sosial dan hiburan.

Pada tahun 2009, lahir jaringan seluler generasi keempat atau 4G yang menawarkan pengalaman berinternet yang semakin cepat. Jaringan 4G masuk ke Indonesia pada tahun 2013 yang memungkinkan ponsel pintar semakin berevolusi melahirkan aplikasi-aplikasi yang mempermudah aktivitas masyarakat seperti aplikasi transportasi daring dan uang elektronik.

Perkembangan teknologi yang melahirkan Internet of Things (IoT) membuat semua perangkat elektronik terhubung ke internet. Konektivitas 4G yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan koneksi yang semakin masif ini sehingga lahir 5G. 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel, yang menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dibandingkan jaringan sebelumnya.

Tidak hanya kecepatan yang tinggi, 5G juga menawarkan latensi yang lebih rendah. Dengan rendahnya latensi ini, komunikasi antar perangkat dapat berlangsung lebih cepat. Hal ini penting pada aktivitas-aktivitas yang sensitif terhadap waktu seperti mobil otonom atau tindakan medis jarak jauh.

5G

- Data rate hingga 20 x lebih cepat (20 Gbps)
- Latency 10 x lebih rendah (1ms)
- 1.000 kali lebih cepat dari 4G
- Tidak hanya layanan mobile broadband untuk konsumen, namun juga untuk Industry 4.0

kemkominfo 10-06-2021

IndonesiaBaik.id IndonesiaBaikID Riset Rosi Okt. Grafis Ananda Syaifulhah

FMS GPR JURNAL BIALOG INDONESIA.GO.ID InfoPublik Indonesia Baik.id GPR TV KOMINFO newsroom

Dengan kemampuan yang disediakan oleh 5G, perangkat-perangkat IoT dapat terkoneksi dengan jaringan internet sehingga semakin banyak data yang bisa dikumpulkan. Beragam data ini akan bermanfaat untuk banyak keperluan seperti mewujudkan kota pintar. Berdasarkan data-data tersebut, sebuah kota pintar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memberikan kualitas hidup yang lebih tinggi untuk masyarakat.

Sebuah kota pintar bisa memberikan fasilitas transportasi publik yang lebih baik, infrastruktur energi yang lebih efisien, solusi terhadap pengolahan limbah, dan kualitas udara yang lebih baik. Semua ini beserta teknologi-teknologi futuristik lainnya seperti mobil otonom, pabrik

pintar, realitas virtual dan tertambah (VR/AR), serta komputasi cepat bisa terwujud dengan teknologi 5G.

Nah, jadi sudah jelas kan bahwa 5G tidak hanya untuk internet yang lebih cepat dalam mengunduh dan mengunggah konten, namun lebih dari itu dapat mengubah cara hidup kita di masa depan dengan berbagai perangkat teknologi mutakhir. Yuk mari kita bersama-sama memanfaatkan perkembangan teknologi 5G untuk hal-hal yang bermanfaat ya sobatkom, ditunggu inovasi-inovasinya dalam memanfaatkan teknologi demi masa depan Indonesia maju.



Lanjutkan Pembangunan BTS 4G, Menkominfo: Hak Rakyat



Dengan adanya akses internet, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah pun diharapkan dapat lebih optimal menjangkau masyarakat.





Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melanjutkan pembangunan *base transceiver station* (BTS) di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Kelanjutan pembangunan BTS sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka mempercepat pemerataan akses internet bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, pembangunan BTS merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat di dunia digital. Menurutnya, program penyediaan BTS 4G dituntaskan untuk memenuhi hak rakyat dalam memperoleh konektivitas atau jaringan digital.

“Karena itu kan keperluan masyarakat. Akses itu harus kita berikan kepada masyarakat,” ujar Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (25/09/2023).

Menurut Menteri Budi Arie Setiadi, pembangunan BTS 4G merupakan salah satu agenda prioritas nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi (BAKTI), melaksanakan pembangunan BTS dalam dua tahap. Tahap pertama, hingga Tahun 2020 total pembangunan BTS telah mencapai 1.682 lokasi di mana seluruhnya telah migrasi ke layanan jaringan 4G pada tahun yang sama. Hingga 26 Desember

2023, sudah seluruh BTS 4G telah on-air untuk 1.682 lokasi. Sedangkan pembangunan BTS tahap kedua yang dimulai sejak tahun 2021, dilakukan di 5.618 lokasi dan dibagi dalam dua fase.

“Fase 1 Tahun 2021 di 4.112 lokasi dan Fase 2 Tahun 2022 di 1.506 lokasi. Pembangunan difokuskan pada wilayah 3T, dengan 76% cakupannya berada di timur Indonesia, yakni Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” tuturnya.

Untuk Tahap 2 BTS di sebanyak 4.990 lokasi telah on air dari keseluruhan target. Ada pun sejumlah 628 lokasi belum on-air, sebagian besarnya diakibatkan karena status kahar keamanan di Papua dan kesulitan mobilisasi material ke lokasi. Guna mempercepat penyelesaian, Kementerian Kominfo melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi terbaik. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie pun berharap agar dampak operasional BTS 4G dapat dirasakan langsung masyarakat di daerah 3T.

“Dengan adanya akses internet, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah pun diharapkan dapat lebih optimal menjangkau masyarakat. Semoga masyarakat di daerah 3T dapat merasakan manfaat dari beroperasinya BTS, sehingga tidak ada lagi kesenjangan digital di Tanah Air,” ungkapnya.



”

Proyek Palapa Ring merupakan proyek *backbone* infrastruktur telekomunikasi serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer yang menjangkau 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia





BAKTI Kominfo merupakan Badan Layanan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dalam memberikan layanan infrastruktur telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI). Ada pun beberapa program utama BAKTI Kominfo antara lain penyediaan Satelit Republik Indonesia (Satria), Akses Internet, Palapa Ring, BTS (Base Transceiver Station) dan pengembangan ekosistem digital di sektor prioritas (Literasi Digital, UMKM, Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan Publik, Pemerintahan, Platform dan Konten Digital).

Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar menegaskan komitmennya dalam mempercepat penyelesaian dan optimalisasi program pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk mendukung transformasi digital nasional. Menurutnya komitmen itu dilakukan dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

“Kami di BAKTI Kominfo tentunya akan melaksanakan apa yang menjadi amanat Presiden Republik Indonesia agar semua program nasional

yang dikelola BAKTI tetap berjalan dan diselesaikan melalui tata kelola yang mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kepatuhan pada seluruh perundang-undangan,” ujarnya dalam Pertemuan dengan Pekerja Media di Kantor BAKTI Kementerian Kominfo, di Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2023).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa percepatan itu mencakup Pembangunan *base transceiver station* (BTS), jaringan serat optik Palapa Ring, dan pengoperasian Satelite Republik Indonesia (SATRIA)-1. Menurutnya, Proyek (Palapa Ring) saat ini sudah selesai dilaksanakan dan mampu pemeratakan akses dan harga layanan internet cepat (*broadband*) di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.

“Proyek Palapa Ring merupakan proyek *backbone* infrastruktur telekomunikasi serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer yang menjangkau 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia,” imbuhnya.



Perkuat Persatuan Bangsa Melalui Infrastruktur Konektivitas Digital

Pembangunan konektivitas untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh lapisan masyarakat merupakan hal penting dalam rangka memperkuat persatuan bangsa. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur konektivitas di Tanah Air salah satunya melalui pembangunan *base transceiver station (BTS) 4G*.

”

“Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS,” ucap Presiden saat meresmikan pengoperasian sinyal BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan akses internet di desa tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta pengoperasian dan integrasi Satelit Republik Indonesia (SATRIA) - 1 di BTS Bowombaru Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).

Kepala Negara menegaskan pembangunan infrastruktur konektivitas termasuk tol langit adalah upaya agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses yang setara ke dunia digital.

“Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS,” tegasnya.

Presiden mengapresiasi kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berhasil menyelesaikan pembangunan 4.990 BTS 4G. Presiden menekankan agar penyelesaian prioritas pembangunan tidak tertunda karena masalah administrasi dan hukum.

“Setelah dikejar empat bulan lebih sedikit juga bisa diselesaikan masalah-masalah yang ada, karena menyangkut jumlah yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Kepala Negara juga mengapresiasi pendampingan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung sehingga proyek tersebut bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

“Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini persoalan lapangannya, pembangunannya, bisa diselesaikan meskipun masih ada yang tertinggal 630 yang berada di tanah Papua,” tuturnya.



Selesaikan Pembangunan BTS 4G di Papua

Kepala Negara mensyukuri pembangunan BTS 4G di Kabupaten Kepulauan Talaud telah selesai. Namun, Kepala Negara pun menginstruksikan jajarannya untuk segera juga menyelesaikan pembangunan BTS 4G di Tanah Papua.

“Masih ada yang tertinggal 630 yang berada di Tanah Papua. Memang di sana medannya juga sangat sulit, keamanannya juga perlu didampingi. Tadi pagi saya sudah perintahkan ke Pak Panglima TNI dan Kapolri agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanannya sehingga semuanya masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan dengan baik,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan BTS di wilayah Papua memiliki tantangan yang besar sehingga pihaknya memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mendampingi pelaksanaan proyek tersebut agar bisa diselesaikan sesuai target pada 2024.

Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan BTS di wilayah Papua memiliki tantangan yang besar sehingga pihaknya memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mendampingi pelaksanaan proyek tersebut agar bisa diselesaikan sesuai target pada 2024.

“Indonesia sebagai negara yang besar dengan 17 ribu pulau dan kondisi geografis yang beragam membuat pembangunan infrastruktur menghadapi berbagai tantangan yang berat. Infrastruktur konektivitas sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjangkau dan menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

Selain itu, Presiden pun menyoroti pembangunan BTS yang sempat terhambat karena adanya

masalah tindak pidana korupsi. Namun, Presiden menegaskan agar pembangunan BTS tetap berlanjut demi kepentingan masyarakat.

“Ini untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada masalah hukum, proyeknya dihentikan. Proses hukumnya dilakukan, ini (pembangunan)-nya tidak bisa diteruskan. Sudah uangnya hilang, proyeknya nggak berjalan, rugi kanan kiri semuanya rugi,” tandas Presiden.



Targetkan Selesai 2024

Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menargetkan pembangunan 7.200 *base transceiver station* (BTS) 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tuntas pada semester pertama Tahun 2024.

“Tiga bulan mudah-mudahan kita bisa selesaikan yang di daerah kahar, khususnya di Papua,” ujarnya saat memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo dalam acara yang sama.

Menkominfo menegaskan ketersediaan ketersediaan konektivitas internet merupakan hak rakyat agar

lebih mudah dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengapresiasi dukungan semua pihak yang ikut berperan dalam membantu percepatan pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo.

“Kita harus berterima kasih kepada Kejaksaan Agung, BPKP, Kementerian Keuangan, yang sudah membantu proses percepatan pembangunan BTS BAKTI Kominfo,” ungkapnya.

Akhir tahun ini, BAKTI Kementerian Kominfo telah menyelesaikan pembangunan 4.990 BTS 4G. Sementara, pembangunan 630 BTS 4G yang tersisa akan dilakukan dengan kerja sama TNI dan Polri.



“Kita sama-sama membereskan pembangunan BTS yang di daerah Papua karena memang tantangan geografisnya dan juga hal-hal yang menyangkut lingkungan dan sebagainya memang menjadi tantangan tersendiri di Papua,” jelas Menkominfo.

Presiden Joko Widodo melakukan peresmian pengoperasian BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo dan Integrasi SATRIA-1 dengan stasiun bumi. Saat meresmikan secara simbolis, Presiden Joko Widodo didampingi Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut, dan Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar.

Acara juga dihadiri 960 orang penerima manfaat BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo secara daring. Presiden Joko Widodo juga menyapa dan berbincang melalui konferensi video bersama dua penerima manfaat yaitu Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia dan SMK Negeri 3 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan.

Hingga akhir 2023, Bakti Kominfo telah membangun dan mengoperasikan 4.990 BTS 4G di wilayah 3T seluruh Indonesia. Salah

satu menara BTS 4G tersebut berada di Desa Bowombaru Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi BTS ini juga menjadi lokasi Peresmian Pengoperasian Sinyal BTS 4G BAKTI Kominfo dan Pengoperasian Integrasi Satria-1 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

BTS ini memiliki tinggi 52 meter dengan daya listrik sebesar 750 watt. BTS ini memiliki tipe transmisi nirkabel dengan gelombang mikro (microwave) serta memiliki lebar pita sebesar 25 mbps. Desa Bowombaru Utara yang menjadi lokasi BTS ini memiliki luas wilayah sekitar 8 km², terletak di pesisir pantai, dan memiliki populasi 1.000 jiwa dengan fasilitas pendidikan SD, SMP, dan SMA serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Puskesmas. Mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama berupa laos, jahe, kencur, dan kunyit.

Ketersediaan akses internet di daerah ini disambut antusias oleh masyarakat, contohnya para guru dan siswa di sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Melonguane Timur. Mereka kini bisa mencari berbagai informasi yang tersedia di internet dengan mudah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Seremoni Pengoprasian Satria 1 dan BTS 4G BAKTI Kominfo Oleh Presiden Republik Indonesia

GATEWAY MANADO



Informasi Stasiun Bumi Manado

| | |
|--------------------------|--|
| Lokasi Gateway | Jl. AHJ Purukan, Desa Matungkas, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara |
| Luas Area Gateway | 1.500 m ² |
| Jangkauan | Melayani 20 beam meliputi Sulawesi dan Kalimantan |
| Spesifikasi | 1 Antena Gateway Diameter 13m 2 Antena VSAT Diameter 1,8m & 98cm |

Informasi Singkat Tentang Bowombaru Utara

| | |
|----------------------|--|
| Populasi | 478.192 Jiwa |
| Pendidikan | Memiliki beberapa institusi pendidikan tinggi, seperti Universitas Sam Ratulangi |
| Kesehatan | Rumah sakit, puskesmas, Klinik, dan dokter spesialis. |
| Transportasi | Bandara Sam Ratulangi International, Jaringan jalan dan transportasi darat |
| Aspek Ekonomi | Sektor Pertanian, perikanan, dan pariwisata, Pertanian: kelapa, cengkih, dan kopi, Perikanan: sumber daya laut yang melimpah |

BTS BOWOMBARU UTARA

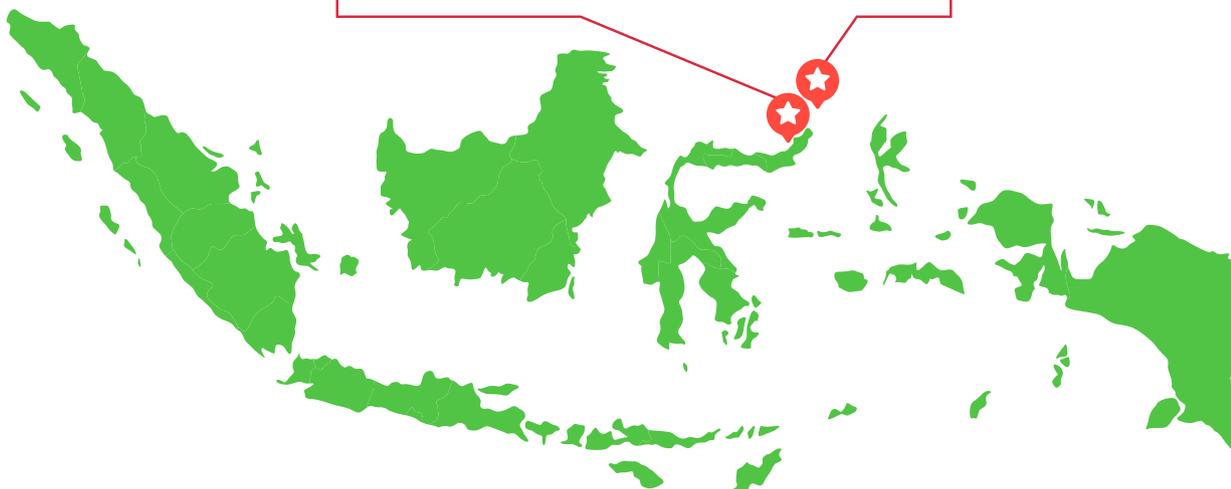


Informasi BTS 4G Bowombaru Utara

| | |
|-------------------------|---|
| Lokasi BTS 4G | Desa Bowom Baru Utara, Kab. Kepulauan Talaud, Bowom Baru Utara, Molonguane Timur, Sulawesi Utara |
| Luas Area BTS 4G | 15x15m |
| Spesifikasi | Tower SST 3L 52 meter, BTS fiberhome, Power PLN & battery 750 watt, Bandwith transmisi Tipe transmisi microwave, Bandwith 25 mbps |

Informasi Singkat Tentang Bowombaru Utara

| | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------|--|
| Luas Daerah | +8 km ² | Kesehatan | Satu Puskesmas Rawat Inap |
| Karakter | Pesisir Pantai dari Pulau | Transportasi | Jalan aspal, angkutan umum tanpa trayek |
| Populasi | 1.000 Jiwa | Aspek Ekonomi | Mayoritas petani (102 orang), laos, jahe, kencur, dan kunyit merupakan komoditas utama |
| Pendidikan | SD, SMP, SMA | | |





<https://www.presidentri.go.id/foto/resmikan-bts-4g-bakti-di-talaud-presiden-tekanan-pentingnya-konektivitas-untuk-persatuan-bangsa/>

Resmikan BTS 4G dan Satria-1, Presiden Tekankan Pentingnya Konektivitas



Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas dalam menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi lain, satu daerah ke daerah yang lain dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas. Kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital termasuk pembangunan BTS,” ungkap Presiden Jokowi saat meresmikan pengoperasian *base transceiver station* (BTS) 4G BAKTI hingga Satelit Satria-1 di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).

Pembangunan BTS 4G BAKTI merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan konektivitas digital dengan membangun infrastruktur digital di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan BTS 4G sempat tertunda karena adanya kasus korupsi. Namun, Presiden tetap meminta proyek pembangunan BTS tetap berjalan.

“Dalam pembangunan BTS, masalahnya ada problem, korupsi sehingga berhenti. Oleh sebab itu, saat itu saya sampaikan kepada Jaksa Agung, ‘Pak masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi, tapi masalah pembangunan jangan sampai berhenti karena biasanya kalau ada masalah korupsi langsung berhenti proyeknya, kalau nggak mangkrak nggak bisa diteruskan’. Dan saat itu Pak Jaksa Agung, ‘Siap, Pak’ akan kami dampingi secara administrasi hukum dan prosedur,” jelas Presiden Jokowi.



Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas. Kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital termasuk pembangunan BTS



Oleh karena itu pembangunan proyek BTS dilanjutkan kembali, karena jika tidak dilanjutkan maka semua pihak akan rugi. Kementerian Kominfo terus mengejar pembangunan BTS 4G yang sempat terhenti. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pembangunan ini untuk kepentingan rakyat, sehingga jangan sampai ada masalah hukum kemudian proyeknya dihentikan.

Pada sambutannya, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa pembangunan BTS 4G masih belum selesai dikarenakan masih ada 630 BTS 4G yang masih harus dibangun di Tanah Papua. Pembangunan BTS di Wilayah Papua memiliki tantangan yang besar sehingga pihaknya memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mendampingi pelaksanaan proyek tersebut agar pembangunan bisa diselesaikan sesuai target pada tahun 2024.





Harapan kami, untuk cakupan layanan fasilitas internet ini dapat diperluas sehingga dapat digunakan oleh seluruh pos-pos di wilayah perbatasan untuk kepentingan pertahanan negara



“Memang di sana medannya juga sangat sulit, keamanannya juga perlu didampingi. Tadi pagi saya sudah perintahkan ke Panglima TNI dan Kapolri agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanannya, sehingga semuanya masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan dengan baik. Saya catat Pak Menteri Kominfo, tadi janjinya tahun depan semester satu. Jangan siap-siap lho, saya catat benar lho,” ungkapnya.

Pada peresmian BTS 4G dan Satria-1 di Kabupaten Talaud, Presiden Jokowi juga berkomunikasi dengan perwakilan daerah dan masyarakat penerima manfaat melalui video conference. Pada kesempatan tersebut, Presiden menanyakan bagaimana kondisi sinyal dan manfaat apa yang dirasakan dengan hadirnya BTS 4G di daerah terutama wilayah 3T.

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara, Dimas Ariadi Dharmawan menjelaskan bahwa fasilitas internet di daerahnya dimanfaatkan untuk menunjang tugas di wilayah perbatasan dan dapat mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan tugas-tugasnya.

“Harapan kami, untuk cakupan layanan fasilitas internet ini dapat diperluas sehingga dapat digunakan oleh seluruh pos-pos di wilayah perbatasan untuk kepentingan pertahanan negara,” ujar Dimas saat merespon pertanyaan Presiden mengenai pemanfaatan BTS 4G.

Presiden Jokowi juga kembali menyapa penerima manfaat lainnya yaitu Kepala SMKN 3 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Kepada Kepala SMKN 3 Sinjai, Kamri,, Presiden menanyakan sejauh mana kualitas suara dan gambar saat melakukan komunikasi melalui aplikasi video conference Zoom. Lebih lanjut, Kamri menyampaikan bahwa bantuan jaringan internet dari BAKTI dimanfaatkan untuk membantu proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Juga membantu siswa dalam hal mengakses informasi atau materi pelajaran yang lebih bermutu.

“Jaringan internet di SMKN 3 Sinjai ini tidak hanya digunakan saja oleh kami di sekolah tapi ini digunakan oleh masyarakat di sekitar sekolah, Pak Presiden. Jadi waktu sore hampir setiap hari masyarakat di sekitar sekolah mengakses jaringan ini lewat BTS yang ada di SMK Negeri 3,” ujar Kamri.

1100 00 110101 0001 110
001 00110 00 1100 1
111 00 111 0101

00110 00 1100 1

001 00110 00 1100 1

111 00 111 0101

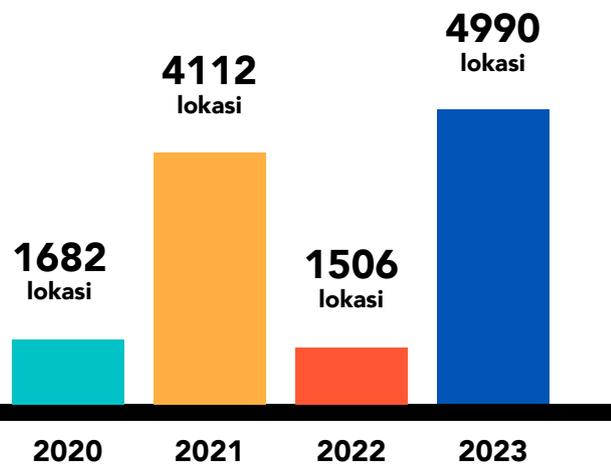
00110 00 1100 1

BTS 4G: Tol Langit Penghubung Nusantara

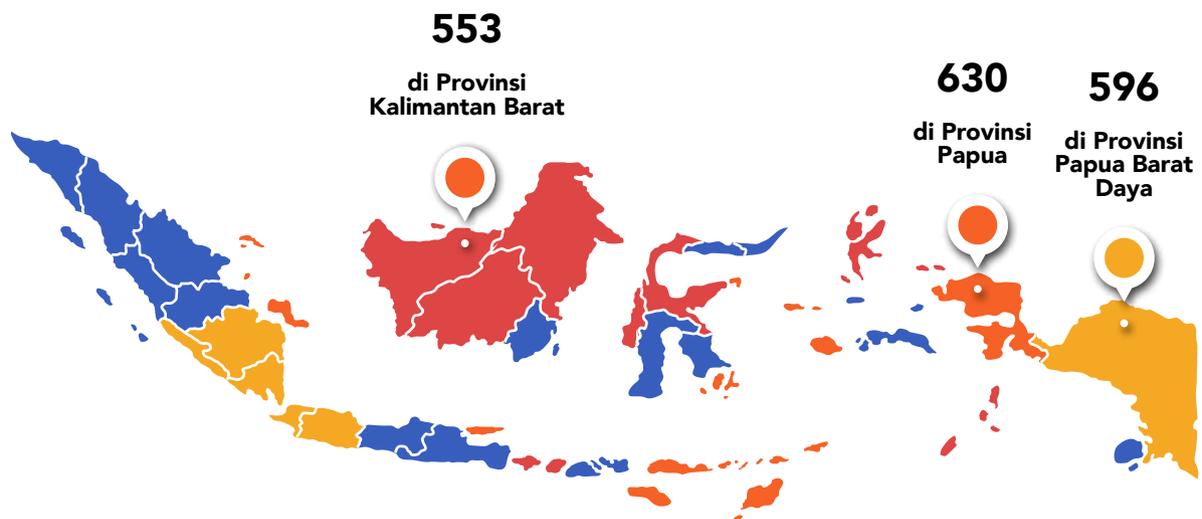
BTS* yang telah dibangun dan beroperasi oleh BAKTI Kominfo

*diutamakan untuk daerah 3T

*tersebar di 134 kabupaten dan 26 provinsi se-Indonesia



Target pembangunan BTS 4G hingga tahun 2025:



(Sumber: Siaran Pers Kementerian Kominfo No. 591,593, 603 Tahun 2023)

Bakti Bangkit, Siap Optimalkan Percepatan Pembangunan BTS 4G

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang kemudian disingkat BAKTI, merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Kominfo. BAKTI bertugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) dan penyediaan infrastruktur serta layanan telekomunikasi dan informatika.

Salah satu layanan BAKTI yang saat ini tengah dioptimalkan guna mewujudkan pemerataan infrastruktur adalah percepatan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Meskipun sempat terhambat karena adanya dugaan kasus terkait pembangunan BTS 4G, namun di awal tahun 2023 BAKTI berupaya menjaga layanan ini agar tetap beroperasi serta memperbaiki proses bisnisnya. Sebab, layanan BTS 4G ini sangat dibutuhkan terutama oleh masyarakat di daerah 3T yang wilayah-wilayahnya masih belum terjangkau oleh sinyal seluler ataupun internet.

Salah satu upaya manajemen yang dilakukan adalah dengan mempertimbangkan review dari Kejaksaan Agung, setelah itu baru kami berani untuk melangkah ke depan,



Selain upaya yang dilakukan oleh BAKTI, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi juga turut membantu agar percepatan pembangunan BTS 4G ini tetap berjalan di tengah kasus yang sedang dihadapi, dengan membentuk Satgas Percepatan Proyek Strategis. Satgas ini beranggotakan beberapa instansi dan kementerian, seperti Kementerian Keuangan, LKPP, BPKP, dan unsur Kejaksaan Agung. Satgas Percepatan Proyek Strategis memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada BAKTI dalam menentukan langkah-langkah dan proses yang harus dilakukan, termasuk saat menghadapi kasus terkait BTS 4G.

“Dukungan dan keyakinan dari Menkominfo Bapak Budi Arie sangat kami (BAKTI) rasakan terhadap percepatan pembangunan BTS 4G di daerah. Sehingga, di penghujung tahun 2023 sebanyak 4.990 BTS 4G berhasil dibangun dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,” ujar Dirut Fadhilah Mathar pada wawancara tanggal 23 Januari 2024.

Dari sekian banyak BTS 4G yang telah dibangun, sebagiannya memiliki kapasitas yang masih sangat minim. Selain itu, beberapa diantaranya juga

tidak dapat diselesaikan melalui jalur darat atau dengan teresterial karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Meski demikian, BAKTI tetap mengupayakan dan menargetkan semua BTS yang sudah terinstal akan dioptimalisasikan di tahun 2024, agar masyarakat di daerah 3T dapat menikmati layanan 4G.

Dibalik upaya percepatan pembangunan BTS 4G di daerah 3T, terdapat kendala besar yang dialami oleh BAKTI. Pandemi Covid-19 adalah salah satu kendala terbesar yang pernah dihadapi. Dimana kondisi tersebut menyebabkan gangguan *supply chain* yang mengakibatkan terhambatnya pengadaan komponen-komponen yang dibutuhkan. Selain itu, adanya pembatasan fisik saat pandemi Covid-19 membuat ruang gerak tenaga kerja menjadi tidak leluasa dalam menyelesaikan pembangunan BTS 4G. Permasalahan keamanan seperti di Papua turut menjadi penghambat yang tidak kalah menantang.

Kemudian, persoalan hukum yang sempat terjadi di tahun 2023 juga menjadi salah satu hambatan yang dihadapi dalam proses percepatan pembangunan BTS 4G. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan kembali proses pembangunan BTS 4G, manajemen BAKTI memastikan tidak ada lagi residu terhadap hal-hal terkait penegakan hukum yang akan menghambat.

“Salah satu upaya manajemen yang dilakukan adalah dengan mempertimbangkan review dari Kejaksaan Agung, setelah itu baru kami berani untuk melangkah ke depan,” jelas Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar.



Optimalisasi dan percepatan pembangunan BTS 4G di kawasan 3T yang dilakukan oleh BAKTI tentunya bertujuan agar masyarakat dapat menikmati layanan dengan maksimal



Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi di semester 1, tahun 2024 ini BAKTI akan menyelesaikan *site-site* yang belum beroperasi atau *on air*. Langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan TNI, pihak keamanan, dan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dalam menuntaskan pembangunan BTS 4G di wilayah yang terdampak kahar keamanan. Upaya ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan BTS 4G yang diharapkan dapat dilanjutkan kembali di akhir bulan Januari 2024.



Optimalisasi dan percepatan pembangunan BTS 4G di kawasan 3T yang dilakukan oleh BAKTI tentunya bertujuan agar masyarakat dapat menikmati layanan dengan maksimal. Kepuasan masyarakat terhadap layanan ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan dari optimalisasi BTS 4G di daerah 3T. Apabila masyarakat tidak merasa puas atau ingin menyampaikan keluhan terkait layanan BTS 4G, dapat melakukan pengaduan melalui akun resmi layanan informasi dan pengaduan untuk akses internet, BTS, dan Palapa Ring.

Transformasi BAKTI Di Bawah Kepemimpinan Dirut Fadhilah Mathar

Selain melakukan percepatan pembangunan BTS 4G, di bawah kepemimpinan Direktur Utama Fadhilah Mathar, BAKTI sedang melakukan proses transformasi menuju arah yang lebih baik. Transformasi tersebut diawali dengan perbaikan sistem dan budaya kerja internal serta memperbaiki proses bisnis untuk proyek-proyek strategis nasional. Keseriusan BAKTI dalam memperbaiki sistem internal ditunjukkan dengan mengeluarkan edaran yang berisikan prinsip dalam proses perikatan atau kontraktual guna mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara.

Adapun edaran tersebut berisikan empat larangan dan satu imbauan, diantaranya larangan keterlibatan suap-menyuap, larangan keterlibatan penerimaan atau pemberian uang dan sejenisnya, larangan keterlibatan penerimaan atau pemberian hadiah-hadiah yang tidak patut, larangan keterlibatan penerimaan atau pemberian jamuan yang bermewah-mewah, serta himbauan bagi pejabat dan pegawai untuk menjalani kehidupan sesuai dengan jabatan dan penghasilannya.

“Transformasi ini tentunya diharapkan dapat membuat BAKTI menjadi lebih baik, lebih solid, dan menjadi bukti dari komitmen kami untuk tidak memberikan toleransi atau permisif terhadap penyimpangan keuangan negara,” tegas Dirut BAKTI Fadhilah Mathar.

Namun, dalam proses transformasi yang tengah dilakukan, stigma negatif dan kepercayaan publik terkait kasus yang sempat terjadi di BAKTI, menjadi tantangan cukup berat yang harus

dihadapi. Membangun kembali kepercayaan publik terhadap berbagai layanan yang dilakukan oleh BAKTI merupakan hal penting yang saat ini sedang diupayakan. Dengan tetap memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hadirnya kerja sama tim yang kuat, membuat BAKTI dapat melalui tantangan tersebut dengan baik.

Tidak hanya melakukan transformasi dari segi tata kelola internal saja, BAKTI juga sedang berfokus pada penyediaan ground segment untuk Satria-1. Program Satria-1 ini didesain untuk memberikan layanan internet di lokasi-lokasi layanan publik, seperti Puskesmas, Kantor Desa, sekolah-sekolah, kantor-kantor pusat keamanan dan pertahanan, serta lokasi-lokasi layanan publik lainnya. Hal ini selain bermanfaat untuk masyarakat, program Satria-1 juga dapat menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sampai dengan awal tahun 2024, tercatat ada 20.000 lokasi yang telah dilengkapi dengan layanan internet. Jumlah tersebut diharapkan dapat bertambah hingga 37.000 lokasi yang ditargetkan terealisasi maksimal di tahun 2025 secara bertahap.

Berbagai upaya dan perbaikan yang telah dilakukan oleh BAKTI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas BAKTI, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dinikmati secara maksimal. Hal tersebut tentunya tidak dapat terlepas dari dukungan dari Kementerian Kominfo dan sinergi yang terjalin baik di internal BAKTI maupun dengan stakeholder lainnya.



Transformasi ini tentunya diharapkan dapat membuat BAKTI menjadi lebih baik, lebih solid, dan menjadi bukti dari komitmen kami untuk tidak memberikan toleransi atau permisif terhadap penyimpangan keuangan negara,





Menjaga Frekuensi di Bumi Nyiur Melambai
Michael Pranoto (Balmon Manado)

BTS Seluler dan Infrastruktur Telekomunikasi di Sulawesi Utara

Perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi *wireless/nirkabel* yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio, seiring dengan pertumbuhan penggunaan piranti pintar seperti handphone seluler dan akses internet yang masif, membutuhkan jangkauan layanan yang luas serta kebutuhan kapasitas data yang besar. Hal ini secara langsung memaksa percepatan akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi termasuk *Base Transmission Station (BTS)* Seluler di Indonesia.

Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam yang terdiri dari 17.000 pulau, menjadi tantangan tersendiri dalam Pembangunan infrastruktur telekomunikasi termasuk BTS-BTS tersebut. Padahal BTS-BTS seluler ini dapat menjadi solusi dalam memperluas *coverage* layanan telekomunikasi yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio ke banyak wilayah yang tidak terjangkau.

BTS-BTS seluler ini dapat menjadi solusi dalam memperluas *coverage* layanan telekomunikasi yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio ke banyak wilayah yang tidak terjangkau.



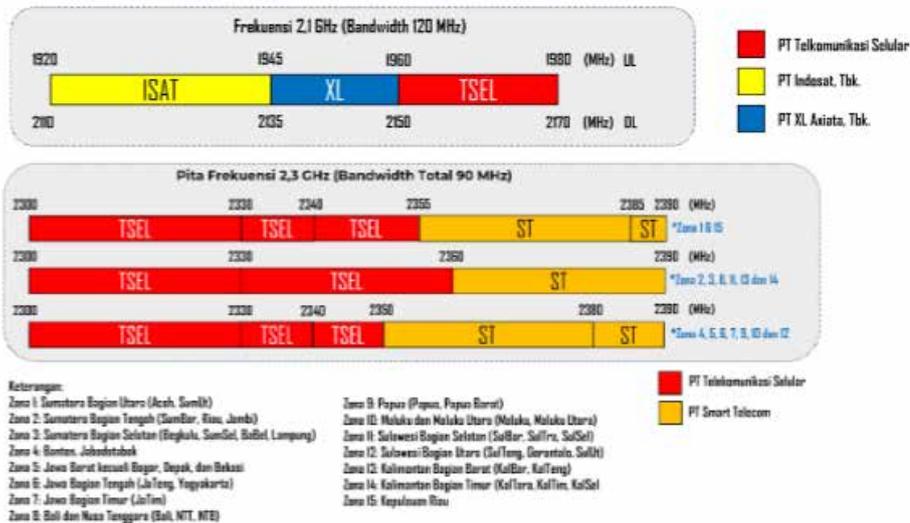
Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 15 Kota/Kabupaten dengan luas wilayah sebesar 14.511,27 km² dengan 3 kabupatennya merupakan wilayah kepulauan, sehingga kebutuhan layanan telekomunikasi menjadi sangat penting bagi 2.659.543 Penduduknya. Hal ini dibuktikan dengan data BPS Sulawesi Utara di tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 82,94 % dari jumlah penduduk menggunakan handphone seluler. Selain itu, hadirnya layanan telekomunikasi juga memiliki nilai lebih sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat Sulawesi Utara yang hidup di daerah terdepan Indonesia seperti di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Beberapa pulau di kabupaten ini seperti Pulau Miangas dan Pulau Maru menjadi pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara Philipina. Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden RI Joko Widodo beserta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria beserta rombongan mengunjungi Kabupaten ini, guna meninjau dan meresmikan BTS 4G BAKTI di Bowombaru Utara, Melonguane Timur, Kepulauan Talaud.

Sampai dengan Desember 2023, Di Sulawesi Utara, terdapat 4 Operator Seluler (Opsel) yang beroperasi, yaitu: PT. Telkomsel sebagai anak Perusahaan PT Telkom Tbk, PT Indosat, PT XL Axiata dan PT Smart Telecom. Dari 4 Operator Seluler tersebut, Telkomsel menjadi Operator seluler dengan jangkauan layanan yang hadir di semua kota/kabupaten sedangkan PT Indosat hadir di 12 kota/kabupaten, PT. XL Axiata hadir di 11 kota/kabupaten, dan PT. Smart Telecom hadir di 9 kota/kabupaten. Berdasarkan data Balai Monitor SFR Kelas II Manado di tahun 2023, terdapat populasi BTS Seluler termonitor sebanyak:

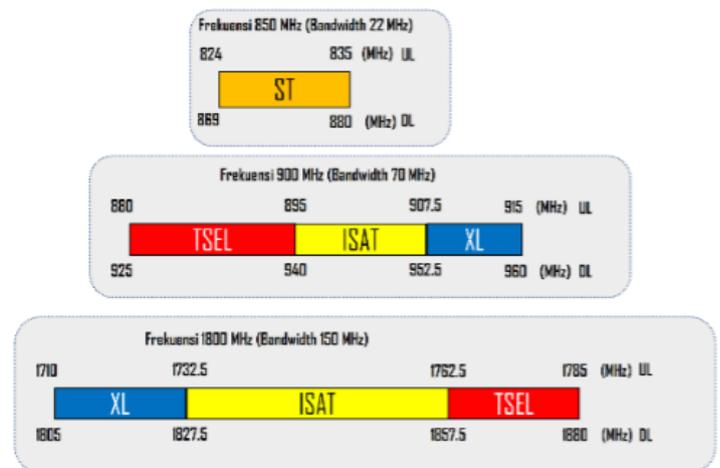


| Wilayah/Opsel | Luas Wilayah (Km ²) | PT. Telkomsel | PT. Indosat | PT. XL Axiata | PT. Smart Telecom |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| Kota Manado | 162,35 | 143 | 186 | 90 | 54 |
| Kota Tomohon | 169,06 | 33 | 30 | 13 | 9 |
| Kota Bitung | 329,72 | 40 | 65 | 51 | 15 |
| Kota Kotamobagu | 108,89 | 28 | 48 | 15 | 11 |
| Kab. Minahasa | 1.128,45 | 110 | 145 | 53 | 36 |
| Kab. Minahasa Utara | 1.644,37 | 94 | 74 | 56 | 24 |
| Kab. Minahasa Tenggara | 753,14 | 27 | 29 | 22 | - |
| Kab. Minahasa Selatan | 1.456,69 | 58 | 76 | 27 | 7 |
| Kab. Bolaang Mangondow | 3.269,30 | 71 | 53 | 17 | 6 |
| Kab. Bolaang Mongondow Timur | 859,97 | 20 | 25 | 2 | 1 |
| Kab Bolaang Mongondow Utara | 1.644,37 | 23 | 21 | 7 | - |
| Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 1.796,07 | 20 | 19 | - | - |
| Kab. Kepulauan Sangihe | 597,26 | 44 | - | - | - |
| Kab. Kepulauan Sitaro | 217,29 | 26 | - | - | - |
| Kab. Kepulauan Talaud | 1.012,14 | 35 | - | - | - |
| Total | 14.500,28 | 772 | 771 | 353 | 163 |



Saat ini, akibat tidak meratanya penyebaran BTS, membuat masih terdapat daerah yang tidak terlayani (*blank spot*). Hal ini dapat dilihat di 3 Kabupaten Kepulauan yaitu Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro dan Kab. Kepulauan Talaud, yang jumlah BTS nya masih sedikit dan hanya 1 Opsel yang melayani daerah tersebut. Adanya Pembangunan BTS Bakti Kominfo di wilayah-wilayah tersebut cukup membantu mengurangi *blank spot* di 3 kabupaten tersebut.

Berbicara tentang BTS Seluler, tidak akan lepas dari penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan tulang punggung infrastruktur telekomunikasi. Berhasil atau tidaknya BTS Seluler menjalankan fungsinya, semua tergantung apakah frekuensi radio yang dimanfaatkan tersebut aman serta bebas gangguan. Setiap BTS Seluler menggunakan spektrum frekuensi radio baik dalam konektivitas antar BTS (*microwave link*) maupun yang digunakan untuk melayani konektivitas ke pelanggan (pita frekuensi *mobile broadband*). Di Sulawesi Utara terdapat total populasi ISR *microwave link* seluler per Desember 2023 mencapai 7.208 ISR. Adapun Pita frekuensi *mobile broadband* yang digunakan setiap Opsel telah sesuai dengan alokasi pita frekuensi radio seluler nasional di pita 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz dan 2300 MHz.



Dalam penggunaan spektrum frekuensi radio seluler di Sulawesi Utara, pengawasan dan pengendalian menjadi hal yang krusial untuk memastikan agar penggunaan frekuensi radio tersebut dapat dioptimalkan dengan baik. Karena itulah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Manado hadir dan berkomitmen agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio termasuk seluler dapat bebas dari gangguan serta sesuai dengan peruntukannya. Balai Monitor SFR Kelas II Manado rutin melaksanakan Monitoring dan pemeriksaan BTS Seluler untuk memastikan setiap Operator Seluler menggunakan frekuensi radio dengan tertib serta sesuai dengan parameter yang dimiliki. Selain itu, sesuai target kinerja tahun 2023, dilakukan kegiatan verifikasi data koordinat BTS yang disebut Prima Aksi.

Prima Aksi bertujuan untuk memudahkan operator seluler dalam melakukan pengurusan izin agar tidak terkendala ketidaksesuaian antara koordinat *site* BTS yang didaftarkan dengan lokasi di lapangan. Selama tahun 2023, telah dilakukan kegiatan Prima Aksi di 5 Kota/ Kabupaten yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kab. Minahasa dan Kab. Minahasa Utara. Sebanyak 42.4% dari total ISR telah diverifikasi.

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan, secara rutin dilakukan kegiatan operasi penertiban serta penerapan sanksi administratif untuk setiap pelanggaran yang ditemukan. Balai Monitor SFR Kelas II Manado juga melakukan kegiatan penanganan gangguan apabila dalam operasionalnya, frekuensi yang digunakan oleh operator seluler tersebut terganggu. Dengan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio yang dilakukan, Balai Monitor SFR Kelas II Manado berharap agar infrastruktur telekomunikasi seluler ini dapat menjadi motor penggerak Pembangunan di Sulawesi Utara menuju Indonesia Maju.

#frekuensiatukannegeri
#balmonmanadobisa



Wajah Baru Balmon Manado
Manuelson Jaka Jusuf (Balmon Manado)



Kominfo Berbagi Buku di Taman Bacaan Masyarakat Rumah Kreatif Sahabat Nusantara Pulau Ende Nusa Tenggara Timur

Kominfo Berbagi Buku (KBB) adalah kegiatan sumbang buku dari sivitas kominfo yang akan diberikan kepada Taman Bacaan Masyarakat di daerah. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian Kominfo Karnaval 2023 yang diselenggarakan pada bulan September.





Donasi buku dikirimkan dari Jakarta ke Taman Bacaan Masyarakat Anak Cinta Lingkungan (TBM ACIL) Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur melalui jasa pengiriman. TBM Acil adalah tempat transit donasi buku sebelum dikirimkan ke TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara di Pulau Ende. Donasi buku yang dikirimkan sebanyak 7 kardus besar atau 1000 eksemplar.



Pengangkutan donasi buku dari TBM Acil memakai kendaraan roda tiga, menuju pelabuhan Soekarno Ende.



Penurunan donasi buku dari angkutan roda tiga ke gerobak menuju kapal





Penurunan donasi buku dari gerobak ke kapal penyebrangan menuju Pulau Ende.



Tiba di Pulau Ende, donasi buku diangkut menggunakan kendaraan roda tiga menuju TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara Pulau Ende.



Donasi buku tiba di TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara Pulau Ende



Donasi Buku diterima oleh Bapak Hifni Djafar pengurus Rumah Kreatif Sahabat Nusantara serta Bapak Ahmad Ridwan Kepala Dusun Kemo, Desa Rendoraterua, Pulau Ende. Untuk donasi buku ini juga akan disalurkan ke-9 desa, yaitu :

- Pos Baca Annur
- Pos Baca Alma'arif
- Pos Baca Almu'minun
- Pos Baca Kema Sama
- Pos Baca Hayyaalosholah
- Pos Baca Aqilah
- Pos Baca Smanpend
- Pos Baca Alisro
- Pos Baca Alqurobah

Bapak Hifni mengucapkan terima kasih atas bantuan donasi buku ini dan berharap agar bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Keterbukaan Informasi dalam Pemilihan Umum

Oleh: Helmi Fajar Andrianto

Wakil Pimred Majalah KominfoNext

Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Sejak awal berdiri, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai 'jalan ninja' untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pilihan sebagai negara demokrasi tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 1 ayat 2 (setelah amandemen) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar".

Kedaulatan berada di tangan rakyat menjadi frasa penting dalam pengejawantahan Indonesia sebagai negara demokrasi, dimana secara prinsip, kekuasaan hingga arah kebijakan negara dan pemerintahan harus sesuai dengan suara dan kehendak rakyat, *ox populi, vox dei* (suara rakyat, suara Tuhan).



Sumber: Google Arts & Culture, Howard Sochurek 1955

Demokrasi yang berlaku di Indonesia bersifat demokrasi tidak langsung, yang artinya bahwa untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan, rakyat tidak bisa secara langsung, namun diwakilkan oleh sekelompok rakyat yang menjadi representasi dari rakyat secara keseluruhan. Mekanisme perwakilan ini berpotensi besar menimbulkan *gap* antara keinginan rakyat dengan perwakilannya, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan demokrasi langsung.

Namun sistem demokrasi langsung tidak memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia, dan sebagian besar negara demokrasi di dunia lainnya, mengingat jumlah penduduknya yang mencapai 270,20 juta jiwa (SP2020). Bisa dibayangkan bagaimana *ribetnya* untuk mendengarkan suara 270 juta manusia untuk menentukan satu kebijakan saja.

Pemilihan umum (Pemilu) menjadi manifestasi dari negara yang berasaskan demokrasi. Sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya, Pemilu menjadi event yang terasa spesial dan *grande*, yang hingar bingarnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di berbagai lapisannya.

Masih terbayang jelas di benak penulis semasa kecil di sebuah kabupaten di wilayah Jawa Tengah, ramai dan megahnya pemilu di tahun 90an dengan parade motor yang melintasi kampung-kampung, berbagai *collectable items* berupa atribut-atribut kampanye, hingga konser-konser grup band papan atas yang menjadi bumbu penyedap di setiap kampanye partai politik. Kesemuanya hal tersebut semakin menasbihkan Pemilu sebagai pesta demokrasi.

Merujuk pada konteks sejarah, Indonesia baru dapat menyelenggarakan Pemilu setelah sepuluh tahun kemerdekaan, yaitu pada tahun 1955. Pemilu pertama tersebut diikuti oleh 30 partai politik, organisasi massa, hingga calon perseorangan untuk menghasilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante.

Sebagai *tools* bagi konsep demokrasi tidak langsung, dalam pelaksanaan Pemilu 1955 pun, ternyata prosesi pencoblosannya juga dilaksanakan secara tidak langsung sesuai amanat UU 27/1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan

UU 12/1949 tentang Pemilu. Hal ini didasari pada kondisi masyarakat Indonesia di masa itu yang mayoritas masih buta huruf, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kendala.

Titik balik sejarah pemilu terjadi pada tahun 1971, ketika dimulainya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemilu pada tahun tersebut masih diikuti oleh banyak partai politik dengan Golongan Karya sebagai pemenang pemilu. Hingga selama lima kali Pemilu berikutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, jumlah peserta Pemilu ajeg dengan hanya diikuti oleh tiga peserta yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Selama masa itu pula, Golongan Karya meraih suara terbanyak dalam Pemilu sepanjang Era Orde Baru.

Sejalan dengan berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, Pemilu pertama di Era Reformasi dilaksanakan pada tahun 1999. Pemilu pada tahun tersebut mencatat rekor peserta Pemilu terbanyak sepanjang sejarah republik ini, yaitu mencapai 48 partai politik. Dalam perjalanannya, hanya 21 partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem Pemilu pada tahun ini juga, kurang lebih sama dengan Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, di mana presiden dan wakilnya belum dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemilihan secara langsung presiden & wakil presiden, wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD, baru dilaksanakan pada Pemilu kedua di Era Reformasi, yaitu di tahun 2004.

Dilihat dari kacamata keterbukaan informasi, selama pelaksanaan Pemilu dari tahun 1955 hingga tahun 2009, tidak ada perubahan yang cukup mendasar baik dari aspek regulasi hingga pelaksanaannya di lapangan. Walaupun nama-nama calon legislatif (*caleg*) sudah tercetak di kertas suara, yang mengindikasikan informasi mengenai siapa saja *caleg* yang bisa dipilih rakyat, namun proses perhitungan hingga sampai pada tahap pengumuman hasil pemungutan masih belum bisa dipantau secara komprehensif, baik oleh lembaga-lembaga pengawas pemilu, saksi-saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga masyarakat umum yang sekadar penasaran dengan hasil pemilihan di lingkungan tempat tinggalnya.

Informasi mengenai perhitungan hasil pemungutan suara, hanya bisa dipantau dengan mengikuti secara langsung proses pemungutan, kemudian mencatat hasil tersebut pada file masing-masing petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) maupun saksi dari partai politik.

Merujuk dari informasi situs Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jumlah PPL yang bertugas di setiap desa/kelurahan dalam Pemilu tahun 2009, tidak sebanding dengan jumlah TPS di setiap desa/kelurahan yang bahkan bisa mencapai 40 TPS. Sedangkan PPL setiap desa/kelurahan hanya dialokasikan sebanyak 1 - 5 orang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu di masa itu.

Selain itu juga, ketiadaan saksi dari partai politik di setiap TPS, menambah sengkabut pengawasan dalam proses perhitungan suara. Absennya saksi dari partai politik di setiap TPS disinyalir karena minimnya anggaran partai yang teralokasi untuk mengakomodir biaya operasional saksi. Hal-hal tersebut memperbesar potensi munculnya kecurangan dalam perhitungan suara di TPS.

Era baru keterbukaan informasi dimulai pada penyelenggaraan Pemilu di tahun 2014, atau 7 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, mengusung inovasi-inovasi baru untuk menghadirkan transparansi proses, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya.

Pada tahap persiapan awal Pemilu, KPU merilis Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif yang akan bertarung memperebutkan suara rakyat. Pada tahap ini, masyarakat bisa mengetahui dan kemudian mengecek *track record* calon-calon wakil rakyatnya sebelum masuk ke bilik suara. Sehingga, ketika tiba saatnya harus memilih, masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan siapa yang caleg yang akan menjadi wakilnya.

Terobosan penting dalam keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu dengan dipublikasikannya Form C1 oleh KPU sehingga dapat diakses publik secara luas. Form C1 merupakan form hasil pemungutan



Sumber Foto: Google Arts & Culture,
Howard Sochurek 1955



Sumber Foto: Google Arts & Culture,
Howard Sochurek 1955

dan perhitungan surat suara yang diinput oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS.

Form C1 ini berisikan informasi mengenai jumlah pemilih yang terdaftar, perolehan suara masing-masing capres, tanda tangan saksi dan KPPS, hingga jumlah surat suara yang rusak, tidak sah, dan tidak digunakan. Tahap publikasi Form C1 dimulai dengan pengisian hasil pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS. Form ini kemudian akan dipindai dan *diupload* ke situs KPU / Sistem Informasi Pemilu agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Hadirnya Form C1, memungkinkan setiap masyarakat bisa turut serta mengawasi jalannya Pemilu, di samping tentunya PPL dan juga saksi-saksi dari perwakilan partai politik. Pengawasan yang berlapis diharapkan dapat menekan potensi kecurangan yang terjadi pada proses pemungutan hingga perhitungan surat suara pada tingkat TPS di tiap desa/kelurahan.

Pada tahap akhir, KPU menyediakan informasi hasil rekapitulasi perhitungan Pemilu yang bisa diakses secara daring. Informasi hasil rekapitulasi tersebut diupdate secara reguler sesuai data perhitungan yang telah masuk dari TPS-TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Rekapitulasi yang disajikan KPU ini berlaku sebagai data hitung cepat, sehingga dengan mengetahui informasi tersebut, para caleg bisa melakukan *check & balances* disesuaikan dengan data Form C1 maupun catatan dari saksi tiap perwakilan partai politik.

Terobosan-terobosan terhadap aspek keterbukaan informasi publik Pemilu, saat ini dirasa sudah cukup memenuhi ekspektasi masyarakat. Hadirnya Form C1 serta DCS yang bisa diakses publik, menjadi satu jurus ampuh yang dapat membangun optimisme dan persepsi masyarakat akan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Harapan untuk semakin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mencoblos, juga semakin meningkat seiring dengan skeptisme yang mulai dikikis melalui keterbukaan dan transparansi informasi. Bukan tidak mungkin, persentase



Terobosan penting dalam keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu dengan dipublikasikannya Form C1 oleh KPU sehingga dapat diakses publik secara luas.



pemilih pada Pemilu 2024 dapat mencapai angka diatas 90%, jauh lebih baik dibandingkan Pemilu 2019 yang hanya mencapai 81% atau sekitar 158 juta pemilih.

Pemilu sebagai manifestasi demokrasi di Indonesia, akan kembali diuji pada 14 Februari nanti. Masyarakat dunia akan melihat, bagaimana seluruh elemen bangsa dapat saling bahu-membahu untuk melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan. Tinta sejarah bangsa akan kembali menulis kisah perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Harapan yang termaktub tentunya sejarah yang manis, jauh dari kisah pilu dan agitasi lainnya.

Pilihan boleh beda, tapi kita tetap bersaudara.

Selamat berpesta demokrasi bagi SobatKom semuanya.

Temukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu?

Yuk, Adukan Lewat SIETIK



Guna mendukung digitalisasi pengawasan etika pemilihan umum yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi aplikasi Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (SIETIK).

Jadi, bagi SobatKom yang menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara

pemilihan umum atau masih belum tahu ingin mengadu kemana jika menemukan adanya pelanggaran pemilu, bahkan malas datang dan antri di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, jangan khawatir karena kini sudah ada aplikasi Sistem Informasi Kode etik Penyelenggara Pemilu (SIETIK) yang mempermudah pengaduan kecurangan pemilu.

Berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017, Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017, serta Peraturan DKPP Nomor 1 tahun 2021, saat ini Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkolaborasi bersinergi merilis aplikasi Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu atau SIETIK sebagai sarana menerima laporan atau pengaduan terkait pelanggaran etik di kontestasi Pemilu 2024.

DKPP bersama Kementerian Komunikasi Kominfo telah merampungkan Aplikasi SIETIK yang telah dirancang sejak 2021. Kolaborasi antara dua instansi pemerintah ini diwujudkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kode Etik.

Aplikasi SIETIK dapat diakses melalui laptop ataupun handphone dengan mudah, kapanpun dan dimanapun. Sedangkan untuk detail pengaduan, hanya dapat dipantau oleh pengadu dan tim DKPP

Penandatanganan PKS telah dilaksanakan di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (30/08/2022) oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli dan Direktur Layanan Aplikasi Layanan Informatika Pemerintahan (LAIP) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, yang kala itu dijabat Bambang Dwi Anggono.

“Sejak penandatanganan PKS Pemanfaatan dan Pengelolaan SIETIK tahun 2022 silam, sudah terdapat pengguna sebanyak 275 pengguna dengan rata-rata pengunjung bulanan sejumlah 36.508 orang sepanjang tahun 2023.” jelas Analis Data dan Informasi Direktorat LAIP Ditjen Aptika Allysa Apsarini di Jakarta Pusat dalam tanya jawab melalui aplikasi percakapan daring bersama Tim Peliput Majalah KominfoNext pada Selasa (16/01/2024).

Selain itu, Kementerian Kominfo juga telah memberikan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIETIK kepada tim DKPP pada tahun 2022. Pada bulan Desember 2023, DKPP melakukan re-launching aplikasi SIETIK versi 2.0.

Allysa merinci, dalam PKS Pemanfaatan dan Pengelolaan SIETIK mencakup penyediaan fasilitas PDN dan SPLP, penjaminan keamanan data dan informasi dalam aplikasi SIETIK, pemberian dukungan teknis apabila terjadi permasalahan dalam aplikasi SIETIK, serta pemberian alih pengetahuan terkait SIETIK kepada tim DKPP.

“Jadi, aplikasi SIETIK memproses mulai dari pengaduan, verifikasi, penjadwalan sidang, penjadwalan pleno, hingga pengumuman tindak lanjut putusan,” tuturnya.

Apabila publik ingin mengetahui lebih detail mengenai proses pengaduannya, di dalam aplikasi SIETIK terdapat fitur Riwayat Pengaduan yang memungkinkan pengadu untuk melacak posisi pengaduannya sudah sampai di bagian mana.

“Ketika jadwal sidang sudah keluar, maka pengadu akan mendapatkan undangan sidang melalui email terkait detail waktu, jam, dan tempat pelaksanaan sidang. Fitur tersebut hanya tersedia untuk pengadu,” paparnya.

Allysa melanjutkan, apabila putusan telah dijatuhkan, maka barulah hasil putusan tersebut akan diumumkan kepada publik melalui aplikasi SIETIK. Selanjutnya, mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu dalam aplikasi SIETIK, masyarakat selaku pengadu dapat melaporkan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dalam aplikasi tersebut secara online melalui website maupun mobile apps.

“Aplikasi SIETIK dapat diakses melalui laptop ataupun handphone dengan mudah, kapanpun dan dimanapun. Sedangkan untuk detail pengaduan, hanya dapat dipantau oleh pengadu dan tim DKPP,” ungkapnya.

Namun demikian, mengenai hasil akhir putusan pengaduan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka melalui laman <https://sietik.dkpp.go.id>. Pada laporan tersebut, pengadu wajib mencantumkan kronologi kejadian, data teradu, saksi, serta bukti-bukti yang mendukung aduan tersebut.

Aduan akan diterima oleh tim pengaduan DKPP untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi

materiil. Jika sudah memenuhi syarat, maka tim persidangan DKPP akan menjadwalkan persidangan untuk menetapkan putusan.

Lebih dari itu, agar Aplikasi bisa berjalan secara optimal memerlukan perawatan. Allysa memberi contoh, misalnya dari segi pemanfaatan, fasilitas data center, mitigasi, hingga *maintenance*, Direktorat LAIP memfasilitasi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi SIETIK.

“Dukungan tersebut termasuk pengembangan modul baru dalam aplikasi, menjaga ketersediaan dan keberlangsungan aplikasi, serta perbaikan apabila terdapat bug yang menyebabkan aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tandasnya.



Terintegrasi Lewat Digitalisasi

Melansir laporan Kinerja DKPP tahun 2023 pada laman <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/01/laporankinerjadkpp2023.pdf>, Aplikasi SIETIK sangat penting untuk pelaksanaan Pemilu di masa mendatang, karena salah satu fungsinya dapat menyajikan rekam jejak penyelenggara Pemilu yang akan mengikuti proses seleksi atau rekrutmen Anggota KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, DKPP berharap data rekam jejak yang berdasar pada putusan DKPP dapat memberi sumbangsih agar Pemilu dilaksanakan oleh orang-orang yang berintegritas dan profesional.

Dalam kesempatan terpisah, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan SIETIK adalah sebuah bentuk digitalisasi penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilakukan DKPP.

“Tujuan dari SIETIK ini adalah meningkatkan pelayanan pengaduan secara elektronik dan digitalisasi data perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” jelasnya dalam sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu atau SIETIK Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada sejumlah stakeholder di Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Tujuan dari SIETIK ini adalah meningkatkan pelayanan pengaduan secara elektronik dan digitalisasi data perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Raka Sandi menambahkan, SIETIK juga akan mengintegrasikan seluruh proses penanganan pelanggaran KEPP, mulai dari pengaduan, verifikasi aduan, sidang pemeriksaan, pleno pengambilan putusan, hingga tindak lanjut putusan.

Integrasi ini juga berkonsekuensi pula pada integrasi data penanganan KEPP yang dilakukan DKPP sehingga seluruh penyelenggara Pemilu yang pernah diadakan atau diperiksa DKPP nantinya akan terdata secara digital.

“Banyak pihak yang bertanya, aduan saya sudah masuk belum? Lalu aduan saya sudah sampai mana? Hal ini dapat diketahui jika aduan itu disampaikan melalui SIETIK,” ucap Raka Sandi.

Raka Sandi pun berharap semua pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan SIETIK dalam penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Tentu DKPP tidak bekerja di ruang hampa. Saya harap dengan sistem ini pelayanan DKPP akan semakin baik,” terang Raka Sandi.

Sementara Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan bahwa SIETIK ini merupakan kerja sama antara DKPP dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Meski telah banyak masuk laporan pelanggaran penyelenggara pemilu. Namun demikian, menurut Heddy, DKPP tidak mengubah mekanisme penerimaan pengaduan pelanggaran meski banyak laporan terkait dengan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu.

“Tidak ada yang diubah, hukum acara belum berubah, masih tetap dan belum ada perubahan. Mungkin tools-nya (alatnya) yang berubah,” jelasnya.

Heddy mengatakan, masyarakat dapat tetap mengadukan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu melalui tata cara sebelumnya. Misalnya, datang langsung ke Kantor DKPP yang kini terletak di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, mengirimkan surat lewat kantor pos hingga mengirim surel melalui e-mail resmi DKPP di pengaduan@dkpp.go.id. Bahkan, Masyarakat juga bisa mengadukan dugaan lewat call center DKPP di nomor 1500101.



Sedangkan Sekretaris DKPP David Yama menyebut proses digitalisasi dalam penegakan KEPP adalah salah satu fokus inovasi atau pembenahan yang dilakukan DKPP.

“Kami sudah membuat call centre DKPP. Pembenahan atau inovasi ini tentunya untuk memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan,” kata David.

Siapkan PDNS sebagai Infrastruktur Pendukung

Sebelumnya, Mmenkominfo Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023), mengatakan kementerian yang dipimpinnya menyediakan dukungan pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang bisa digunakan beragam aplikasi. Salah satunya Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (SIETIK) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Secara khusus kami telah mengalokasikan 38 Ghz VCPU (Virtual Central Processing Unit), 84 Gb memory, 5.99 Tb storage untuk dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebagai bentuk kerja sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, PDNS juga kami siapkan sebagai infrastruktur kebutuhan database dan server aplikasi SIETIK,” jelasnya.



Kolaborasi Wujudkan Transformasi Digital Lembaga Pemerintah

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan Aplikasi SIETIK akan membantu DKPP dalam mempercepat proses-proses terkait tugas penyelenggaraan pemilu.

“Dengan adanya sistem ini kita akan bangun big data untuk menjadi referensi pengambilan keputusan keputusan berikutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dirjen Samuel menjelaskan, Aplikasi SIETIK merupakan salah satu bagian transformasi digital lembaga pemerintah, sebagai penerapan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Dalam hal ini, Kominfo membantu DKPP dalam menyiapkan aplikasi yang diperlukan, merawat, hingga memastikan sistem ini berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Dirjen Samuel menyatakan koordinasi dan kolaborasi dengan DKPP akan terus dilakukan, terutama saat menjelang pemilu. Sehingga ketika ada pengaduan dari masyarakat dan peserta pemilu dapat diproses dengan memanfaatkan ekosistem teknologi digital.

“Jadi bisa untuk memproses pengaduan atau pelaksana pemilu, karena ini adalah pelaksana pemilu yang melanggar kode etik, DKPP inilah badan atau lembaga yang mengawasi tentang hal itu,” ujarnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan aplikasi tersebut sudah dapat digunakan sesuai tahapan pemilu yang akan berlangsung antara pertengahan atau akhir tahun 2022.

“Dalam proses pemilu akan ada pelaksana pemilu yang bernama KPU, yang diawasi oleh Bawaslu pengawasannya, dan keduanya diawasi secara etikanya apakah mereka menjalankan fungsinya atau menjalankan tugasnya berperan teguh pada etika-etika yang sudah ditetapkan. Jadi dua hal ini internal proses dalam menjalankan pengawasan etika dari penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Dirjen Samuel menegaskan pihaknya diberikan tugas untuk membantu DKPP menyiapkan aplikasi dengan harapan penyelenggaraan pemilu kedepan dapat berjalan dengan baik. Bahkan tidak hanya dengan DKPP, Kementerian Kominfo juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga negara lain dalam mendukung percepatan transformasi digital di pemerintahan.

“Sudah banyak kementerian dan lembaga yang bekerjasama, karena memang itu tugas kita jadi ketika ada permintaan kita pasti layani,” imbuhnya.

Dukung Penyelenggaraan Pemilu, Kominfo Siapkan Layanan Telekomunikasi Berkualitas

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan dukungan infrastruktur digital untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024. Salah satunya dengan menyiapkan layanan telekomunikasi yang berkualitas.

“Seiring dengan rangkaian Pemilu 2024, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melakukan pengukuran *Quality of Service* (QoS) di 514 kabupaten, kota dan titik strategis lainnya, untuk memonitor kualitas layanan broadband dalam rangka mendukung Pemilu,” tutur Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Menteri Budi Arie menjelaskan, pengukuran kualitas layanan telekomunikasi atau *Quality of Service* (QoS) untuk menjaga pelaksanaan Pemilu terutama penghitungan suara tidak mengalami gangguan sinyal. Guna menjaga kualitas layanan, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunikasi yang digunakan KPU dan Bawaslu.

“Kominfo melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan secara rutin. Apabila diperlukan, Bawaslu dapat mengajukan permohonan penambahan kapasitas. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika



telah berkoordinasi dengan PT Telkom terkait kesiapan mendukung Pemilu 2024,” ujarnya.

Guna mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pengukuran kualitas jaringan telekomunikasi demi menjaga pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun sekali itu, Tim Peliput Sekretariat Jenderal Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kominfo menyambangi Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dany Suwardany, di Kantor Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Kamis (18/01/2024).

Jabatan tangan erat dan ucapan mempersilakan masuk, membuat kami nyaman berbincang dengan beliau di ruang kerjanya. Kami

merasakan bahwa Direktur Dany ingin obrolan di siang itu mengalir senyaman mungkin. Ini menandakan bahwa Kominfo adalah tempat yang asik untuk kita berkarya bersama.

Mengawali perbincangan, Dany bercerita, Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk melakukan monitoring penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pemantauan terhadap ketersediaan layanan dan kualitas layanan telekomunikasi di Indonesia.

“Uji jaringan telekomunikasi sudah secara rutin kami lakukan. Tidak hanya saat pelaksanaan Pemilu saja, tetapi kami juga melakukan pemantauan dan pengujian kualitas jaringan telekomunikasi, misalnya saat menjelang Libur Hari



Raya Idul Fitri, Natal, dan ketika tahun baru tiba. Pengujian mencakup kapasitas untuk layanan data, *upload*, *download*, kekuatan sinyal, hingga kualitas layanan suara serta SMS,” ujarnya.

Direktur Dany menyatakan, pada tahun 2018 silam Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Ditjen PPI hanya menerima hasil pengukuran *self assessment* dari operator. Mereka yang melakukan pengukuran sendiri dengan menggunakan perangkat-perangkatnya masing-masing. Setahun kemudian (2019), pihaknya melakukan perhitungan dengan menggunakan perangkat sendiri yang dioperasikan oleh tim internal dan operator seluler bisa juga ikut melakukan perhitungan bersamaan yang hasilnya dapat dijadikan pembanding.

“Alat pengukur yang digunakan kala itu bentuknya berupa tas yg terdiri dari ponsel biasa, tetapi di dalamnya terdapat aplikasi yang dapat melakukan pengukuran terhadap seluruh layanan seluler. Ponsel-ponsel tersebut terhubung ke tablet yang digunakan sebagai masternya yang dapat memerintahkan seluruh ponsel untuk running proses pengukuran melalui koneksi *Bluetooth*,” tuturnya.

Pengukuran kualitas jaringan operator seluler saat itu, menurut Dany, dilakukan dengan metode *static test* dan *drive test*. *Static* dilakukan berdasarkan uji panggilan (*test call*) dengan posisi tidak bergerak pada wilayah yang dapat diakses publik yang berada dalam wilayah cakupan penyelenggara jasa, perhitungan arus didasarkan pada sampel *test call* pada jam sibuk pada hari kerja, ukuran sampel paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh)

test call yang terdiri dari *test call on-net* sebanyak 200 (dua ratus) dan *test call off-net* sebanyak 60 (enam puluh). Sedangkan sistem *drive test* untuk pengujiannya dilakukan selama 5 jam dengan mengambil sampel pada saat berkendara di jalan utama, Kini, sejak adanya Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Kementerian Kominfo, pemantauan dan pengukuran QoS dilakukan secara *remote* atau jarak jauh dari Jakarta.

“Secara rutin kami melakukan QoS Jaringan telekomunikasi di pusat-pusat kantor pemerintahan, puskesmas, sekolah maupun pusat-pusat keramaian seperti pasar, terminal, pelabuhan hingga bandar udara. Kemudian, ditambah lagi sekarang dengan titik-titik lokasi strategis yang diminta oleh KPU dan Bawaslu, misalnya di kantor KPUD tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga titik-titik TPS yang berada di kelurahan maupun kecamatan,” jelasnya.

Quality Of Service memiliki arti sebagai kualitas layanan yang dilaporkan atau diukur oleh alat pada suatu titik dan waktu tertentu. Contohnya adalah standar 4G, yang disepakati disepakati dalam *International Telecommunication Union* (ITU) maupun forum GSMA. Operator seluler secara berkala melaporkan data-data ini, dan kemudian tim PMT melakukan verifikasi lapangan untuk mengecek validitas data yang disampaikan.

Dalam mendukung terlaksananya Pemilu Damai 2024, lanjut Direktur Dany, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait lokasi-lokasi vital pada pelaksanaan Pemilu, serta meminta mereka untuk



melakukan pengukuran *Quality of Experience* (QoE) melalui aplikasi Signal Monitoring (SIGMON) di lokasi-lokasi pelaksanaan Pemilu.

Dukungan infrastruktur telekomunikasi untuk terselenggaranya Pemilihan Umum 2024 ini, kata Dany, bermula saat Kementerian Kominfo melaksanakan rapat dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Desember tahun lalu, dan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya seminggu yang lalu.

Pertemuan itu mendiskusikan perkiraan lokasi-lokasi yang nantinya akan menjadi titik-titik strategis yang perlu dilakukan monitoring terhadap layanan secara kualitas QoS maupun optimalisasi jaringan telekomunikasi.

Pengukuran dan pengawasan akan difokuskan pada titik-titik strategis, seperti kantor KPU, Bawaslu, dan Panwaslu di pusat maupun daerah. Misalnya, di kantor KPUD tingkat kabupaten/kota atau di tingkat provinsi serta kecamatan agar dibantu untuk dilakukan pengukuran kualitas jaringan sehingga pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungannya dapat berjalan lancar.

Sedangkan untuk pelaksanaan pengukuran di titik-titik TPS, Kominfo berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk meminta seluruh penyelenggara Pemilu berperan aktif melakukan pengukuran QoE dengan aplikasi SIGMON di lokasi-lokasi TPS.

“KPU menyampaikan bahwa yang menjadi titik strategis adalah di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jadi, di lokasi TPS itu nanti akan dilakukan perhitungan dan juga rekapitulasi laporan secara online melalui aplikasi yang sudah mereka kembangkan (develop). Oleh karena itu KPU meminta Kementerian Kominfo dapat membantu untuk monitor QoS di wilayah-wilayah TPS tersebut,” papar Dany.

Lewat pertemuan itu, tambah Dany, direktorat yang dipimpinnya kini telah mendapatkan data dari KPU.

“Saat ini, ada sekitar 700 ribu titik TPS. Kita juga sudah sampaikan ke mereka wilayah-wilayah yang sudah ter-cover layanan 4G beserta kualitas sinyal dari masing-masing operator di sebaran titik TPS yang mereka sampaikan,” ungkap Dany.

Antisipasi Lonjakan Lalu Lintas Data Seluler dan Imbauan

Guna mengantisipasi kenaikan trafik, operator seluler akan meningkatkan kapasitas jaringan dan menyediakan backup apabila terjadi gangguan. Selain itu, para opsel juga melakukan upaya antisipatif lain dengan cara melakukan optimasi kualitas dan kapasitas jaringan di titik-titik pelaksanaan pemilu terutama di sekitar kantor KPU, Bawaslu dan lokasi dilakukannya penghitungan suara, menyiapkan petugas dan posko yang akan berjaga 24/7, *command center* serta menyiapkan *call center* yang beroperasi 24/7 dan upaya-upaya lain yang dianggap perlu.

“Operator seluler pun sudah menyiapkan *command center* dan *call center*. Jadi kalau ada keluhan mengenai gangguan jaringan internet, masyarakat juga bisa menyampaikan ke *call center* atau *command center* yang sudah dibangun oleh operator telekomunikasi baik itu operator seluler maupun penyedia *fixed broadband*,” ujar Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Dany Suwardany.

Tak hanya itu saja, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Pusat Monitoring Telekomunikasi pun akan terus melakukan monitoring infrastruktur dan kualitas layanan telekomunikasi selama 24 jam selama kegiatan pemilu sampai dengan penghitungan suara dilaksanakan.

Bahkan, guna memantau kualitas jaringan telekomunikasi saat hari pelaksanaan atau sebelum Pemilu berlangsung, Kementerian Kominfo telah mengimbau kepada KPU maupun Bawaslu di tingkat pusat maupun daerah untuk dapat mengunduh Aplikasi Signal Monitoring (Sigmon).



Aplikasi ini merupakan *outsourcing* yang dapat melakukan monitoring terhadap kualitas sinyal internet dan juga untuk penyediaan layanan internet yang ada di daerah tersebut.

Menurut Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dany Suwardany, pengukuran pada aplikasi Sigmon menjadi sarana monitoring *real-time* terhadap kondisi jaringan telekomunikasi di lapangan.

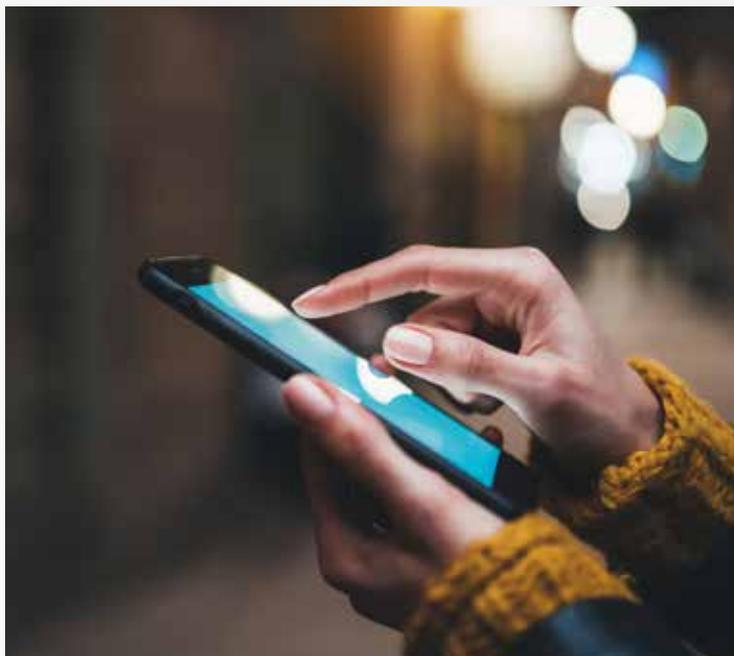
“Jadi ketika petugas KPU yang ditugaskan di TPS telah mengunduh Aplikasi Sigmon di perangkat masing-masing, mereka dapat melakukan pengecekan kualitas sinyal telekomunikasi. Nantinya, saat mereka sudah mengunduh Aplikasi Sigmon, kemudian melakukan pengecekan via aplikasi Sigmon pada saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung atau sebelumnya, lalu ada jaringan yang kualitas sinyal maupun kualitas layanannya belum optimal, bisa kita monitor atau laporkan langsung melalui sistem *dashboard* yang sudah kita bangun,” tuturnya.

Apabila gangguan yang terjadi terkait operator seluler, Kementerian Kominfo meminta kepada opsel untuk dapat memperbaiki atau menyelesaikan gangguan layanan telekomunikasi itu.

“Makanya kitaimbau kepada KPU untuk melakukan pengecekan kualitas jaringan telekomunikasi secara mandiri melalui aplikasi Sigmon. Jadi ketika ada gangguan sinyal internet, kita bisa lakukan tindakan untuk meminta operator seluler menyelesaikan kendalanya. Kita akan keluarkan ticketing atau semacam tanda lapor untuk memantau terus perkembangannya. Jadi, Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) kita ini 24 jam memonitor aduan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial ataupun *feedback report* dari Aplikasi Sigmon yang digunakan pengguna (user) untuk melakukan pengecekan,” terang Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Ditjen PPI.

Dany Suwardany mengaku meski hingga kini belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tenggang waktu penyelesaian kendala jaringan dari opsel, namun ia memastikan setiap kendala tersebut menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

“Memang belum ada standar operator harus menyelesaikan kapan, tetapi umumnya kalau gangguan sinyal internetnya tidak terlalu sulit, operator seluler mungkin dalam waktu yang sudah ditentukan bisa



menyelesaiannya. Karena ini prioritas pemilu, kita minta kepada opsel untuk segera menyelesaikan. Jangan sampai nanti terhambat, misalnya di kantor desa setempat koneksi internetnya tidak bagus, harus menuju ke kantor kecamatan,” jelasnya.

Jika dari hasil pelaporan ditindaklanjuti oleh operator seluler atau membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan kendala itu, Kementerian Kominfo selanjutnya meminta klarifikasi kepada opsel mengapa penyelesaiannya tidak segera diselesaikan.

“Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melalui PMT terus melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan telekomunikasi di Indonesia. Apabila ditemukan adanya layanan yang kurang baik, sistem PMT akan otomatis mengirimkan tiket kepada penyelenggara telekomunikasi terkait untuk ditindaklanjuti.

Tidak hanya itu, Tim PMT juga melakukan tindak lanjut dengan berkoordinasi langsung ke penyelenggara telekomunikasi terkait.

“Kita juga telah mengirimkan surat kepada para operator *fixed broadband* dalam konteks dukungan pemilu ini agar menjaga kualitas QoS dan juga ketersediaan jaringan.

Bahkan, Kementerian Kominfo bersama KPU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) meski belum dibuat susunan tim secara formal melalui Surat Keputusan (SK).

“Satgas ini sudah berjalan, kita buat grup WhatsApp untuk membahas tindak lanjut jika nantinya ada keluhan-keluhan atau gangguan layanan telekomunikasi pada saat Pemilu atau ketika dilakukan perhitungan suara,” tandas Dany Suwardany menutup perbincangan.



Cara dan Prosedur Mengajukan Pindah Memilih pada Pemilu 2024

Bulan Februari 2024 merupakan mesin waktu yang sangat dinantikan dalam menentukan pilihan untuk pemimpin Indonesia lima tahun ke depan. Tepat tanggal 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan berada di bilik suara selama lima menit untuk memutuskan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Periode 2024-2029.

Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat Indonesia juga akan memilih calon wakil rakyat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kota/Kabupaten, dan Anggota DPR RI, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Sebagai warga negara yang mempunyai hak memilih, sudah sepantasnya momentum Pemilu 2024 ini kita manfaatkan hak suara kita untuk menentukan masa depan bangsa dengan berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu terus melakukan berbagai langkah dan kebijakan agar masyarakat dapat memenuhi hak suaranya pada Pemilu 2024. Bahkan aturan secara komprehensif difasilitasi bagi pemilih yang berdomisili di suatu daerah yang bukan merupakan alamat asal. Sebagai contoh, masyarakat yang sedang bekerja di Ibukota Jakarta namun identitas kependudukannya berdomisili di luar pulau Jawa.

Syarat Pindah Memilih

Melansir laman resmi KPU RI (kpu.go.id), masyarakat dapat mengajukan pindah memilih dengan syarat yang sangat mudah, yakni membawa surat keterangan kerja aktif dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Syarat tersebut dapat diajukan ke kantor kelurahan atau KPU daerah setempat.

Adapun syarat tentang pindah pemilih diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Peraturan tersebut berisi syarat bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada pemilu 2024, apabila pemilih yang bersangkutan berada di tempat yang tidak sesuai dengan alamat KTP elektronik.

Agar mudah mengajukan syarat pindah memilih, KPU telah merilis tata cara dan prosedur dengan langkah-langkah sebagai berikut:



Datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau KPU Kabupaten/Kota tempat domisili saat ini.



Pemilih dapat membawa bukti dukung alasan pindah memilih, misalnya karena sedang bekerja dengan melampirkan surat tugas atau surat keterangan aktif kerja.



KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan pemilih agar masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb.



Pemilih akan diberikan bukti dari KPU berupa formulir A-Surat Pindah Memilih.



Selain karena alasan bekerja yang mengharuskan pemilih mengajukan syarat pindah memilih, KPU juga memfasilitasi syarat lainnya bagi pemilih dalam kondisi tertentu, misalnya:

- 1 | Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- 2 | Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- 3 | Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
- 4 | Menjalani rehabilitasi narkoba;
- 5 | Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- 6 | Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- 7 | Pindah domisili;
- 8 | Tertimpa bencana alam;
- 9 | Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- 10 | Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Seperti kita ketahui, dalam Pemilu 2024 terdapat lima jenis pemilih yaitu memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Calon Anggota DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPRD Kota, Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPR RI, dan Calon Anggota DPD RI.

Bagi pemilih yang mengajukan syarat pindah memilih, terdapat ketentuan pada masing-masing jenis pemilihan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Calon anggota DPR jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan DPR;
- Calon anggota DPD jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- Calon anggota DPRD Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan DPRD Provinsi; dan/atau
- Calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota jika pindah memilih ke desa/ kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota.

Guna memastikan keseluruhan syarat pindah memilih sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, Tim Majalah Kominfo Next melakukan pengajuan pindah memilih di Kantor KPU Jakarta Pusat pada hari Senin, 15 Januari 2024. Secara keseluruhan, syarat dan ketentuan yang telah diatur sangat memudahkan calon pemilih untuk mengajukan pindah memilih sesuai dengan alamat domisili tempat pemilih bekerja.





Pemilu Damai dan Sarana Integrasi Bangsa

Euforia dan nuansa politik mulai dirasakan publik Indonesia sejak tahun 2022, berbagai dinamika dan diskusi tentang panggung demokrasi bergema di seantero negeri. Hal ini menandakan kualitas demokrasi di Indonesia semakin lebih baik dengan adanya partisipasi publik.

Sejalan dengan semangat menghidupkan demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) mengusung *tagline* "Pemilu Sarana Integrasi Bangsa". Bahkan pemerintah kemudian membangun narasi Pemilu dengan menyuarakan "Pemilu Damai 2024". Semua upaya tersebut semata-mata untuk memberikan pendidikan politik dan mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan suasana riang gembira dan penuh kedamaian.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai institusi pemerintahan memiliki andil penting dalam

menyukseskan Pemilu 2024. Peran Kementerian Kominfo yang paling krusial adalah menjaga ruang digital atau media sosial agar terhindar dari penyalahgunaan dan memanfaatkan masa pemilu untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Seperti kita ketahui bahwa proses berjalannya pesta demokrasi akan selalu diwarnai dengan informasi yang sangat beragam, tidak terkecuali informasi atau pemberitaan yang bersifat hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, adu domba hingga kejahatan lainnya yang tidak sesuai dengan norma dan etika kehidupan berbangsa di tanah air.

Guna mengantisipasi masifnya berbagai informasi sesat tersebut, Kementerian Kominfo menghadirkan program Narasi Pemilu Damai 2024. Program tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar ikut menyukseskan pemilu yang damai tanpa saling menyerang dalam konteks negatif dengan memanfaatkan ruang digital.

Mari kita sambut dan sukseskan Pemilu 2024 dengan penuh kedamaian dan tanpa perpecahan sesama anak bangsa.



5 Jenis Surat Suara
pada Pemilu 2024,
Apa Saja Bedanya?

Perhelatan Pemilu 2024 akan diadakan pada 14 Februari 2024. Sejumlah persiapan sudah dilaksanakan dari infrastruktur hingga diseminasi informasi terkait Pemilu 2024. Termasuk penyebaran surat suara ke-38 provinsi di Indonesia.

Surat suara sangat penting karena kita akan memilih melalui media tersebut. Untuk itu, perlu diketahui perbedaan yang terdapat dalam surat suara agar kita tidak salah dalam menggunakan surat suara. Terdapat 5 perbedaan surat suara berdasarkan warna, yaitu Abu-Abu, Kuning, Merah, Biru, dan Hijau.

1. Surat Suara Pemilu Abu-Abu



Surat suara berwarna abu-abu ini merupakan surat suara untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara Indonesia. Jangan lupa, pemilih harus menandai atau memberi centang di tempat pasangan calon pilihan agar surat suara dianggap sah.

2. Surat Suara Pemilu Kuning

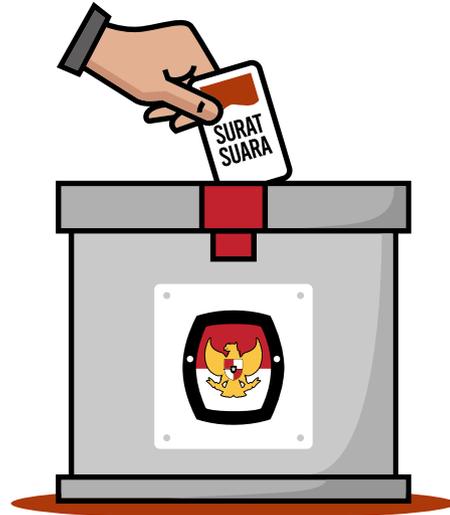


Surat suara berwarna kuning digunakan untuk memilih calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Surat suara ini memuat nama-nama calon anggota DPR RI, nama partai politik, serta gambar partai politik. Pemilih dapat menandai atau memberi centang pada gambar partai politik atau nama calon anggota DPR RI. Ingat, jangan menandai lebih dari satu calon legislatif atau lebih dari satu partai, karena surat suara tersebut tidak sah dan tidak dapat dihitung.

3. Surat Suara Pemilu Merah



Surat suara berwarna merah digunakan untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Surat suara ini memuat daftar nama calon anggota DPD RI sesuai dengan daerahnya. Pemilih harus menandai atau memberi centang pada nama calon Anggota DPD RI agar surat suara dianggap sah.



4. Surat Suara Pemilu Biru



Surat suara berwarna biru digunakan untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI. Surat suara ini untuk memilih calon anggota legislatif tingkat provinsi. Surat suara ini seperti surat suara berwarna kuning, hanya saja nama yang tercantum adalah calon anggota DPRD RI yang akan berbeda setiap provinsi. Pemilih harus menandai atau memberi centang pada gambar partai politik atau nama calon anggota DPRD RI.

5. Surat Suara Pemilu Hijau



Surat suara berwarna hijau digunakan untuk memilih calon anggota legislatif DPRD tingkat kabupaten/kota. Seperti surat suara berwarna kuning dan biru, pemilih juga diwajibkan untuk menandai atau memberi centang pada gambar partai politik atau nama calon anggota DPRD RI.

Itulah perbedaan surat suara yang akan kita dapatkan pada hari Pemilu 2024.

Jangan lupa untuk menggunakan hak pilih kamu ya! Karena hak pilih kamu akan menentukan masa depan Indonesia!



KATA SIVITAS

NETRALITAS ASN

Bayu - Satuan Pengamanan Kominfo

Arti netral bagi saya, yaitu tidak berpihak dan tidak menjurus kepada salah satu kandidat politik atau paslon tertentu. Selain itu, netralitas juga berarti saya tidak berpose dengan menunjukkan keberpihakan, seperti berpose dengan jari angka 1, 2, atau 3. Kalau ada konten hoaks termasuk seputar Pemilu, saya akan komen di konten hoaksnya dan memberi tahu orang-orang terdekat kalau informasi itu hoaks.



Rina Trisnawati - Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen

Netral sebagai ASN artinya tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu partai atau golongan. Tapi bukan berarti gak memilih, kita tetap memilih dengan tidak memperlihatkan secara jelas di medsos. Saya tahu ASN tidak boleh menunjukkan simbol-simbol tertentu yang menunjukkan keberpihakan, untuk saya sendiri sebagai ASN harus sadar betul kalau memang harus netral dan saya gak pernah menunjukkan keberpihakan. Kalau menemukan informasi hoaks tidak akan percaya, apalagi selama masa kampanye banyak berita hoaks yang harus dipilah dan dapat dilihat kebenarannya dari medsos yang terpercaya juga akurat.

Fransiskus Emilius - Staff TU Kesekjenan

Menurut saya netralitas adalah tidak berpihak pada satu kubu tertentu dan tidak menunjukkan sesuatu yang mengindikasikan saya mendukung salah satu paslon. Selain itu, tidak berpose sesuai dengan arahan yang ada, itu juga bagian dari upaya kita untuk netral. Apabila menemukan informasi hoaks seputar Pemilu, saya akan memverifikasi informasinya apakah termasuk disinformasi, misinformasi, atau malinformasi. Saya pasti cek dulu kebenarannya sebelum menyebarkan.





Chandra Sugama - Tim Staf Khusus Menteri

Menurut aku, netralitas adalah ketika aku tidak menunjukkan keberpihakan kepada kandidat manapun, tetap objektif, dan tidak bias atau ambigu. Kalau untuk pose foto atau gerakan tertentu, memang aku tidak pernah pose foto seperti itu. Terus biasanya kalau aku nemuin informasi hoaks, aku akan cek dulu kebenarannya dan jika terbukti hoaks, informasi itu akan berhenti di aku. Jadi aku akan mencegah penyebaran informasi hoaks.

Ferdinandus Setu - Biro Umum Setjen

Netral bagi saya sebagai ASN berarti tidak memihak baik pada paslon capres, parpol peserta pemilu, maupun caleg. Meskipun punya pilihan, kita tidak boleh memperlihatkan kepada publik, karena ASN adalah pemersatu bangsa. Ketika ASN menampilkan keberpihakannya ditakutkan akan menimbulkan antipati. Menurut Saya *pose* bukan menjadi yang utama, tapi tidak berkampanye secara nyata dan menunjukkan kenetralan itu tidak kalah penting. Hoaks harus kita lawan, kalau info hoaks nya ada di grup, akan langsung Saya sampaikan kalau itu hoaks dan diteruskan ke tim AIS Kominfo agar bisa teryakinkan.



Fajar Budiantoro - Inspektorat III

Netral artinya tidak memihak pada setiap peserta yang berkontestasi, sehingga nanti tidak mengganggu pelayanan kita sebagai ASN. Lalu, sebagai ASN tentunya harus mengikuti aturan yang ada, karena ASN sebagai panutan. Tentu saja kita bisa memilah dan memilih informasi yang tergolong hoaks bahkan fitnah. Tentu kita harus tetap netral dan melawan hoaks atau menjelaskan informasi yang sebenarnya dan berpartisipasi positif terhadap kebijakan yang ada.

Vika Andini - Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen

Netral berarti tidak memihak dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada salah satu pasangan atau parpol. Salah satu tindakan yang dilarang adalah dengan memunculkan simbol yang menunjukkan keberpihakan di media sosial atau kehidupan sehari-hari. Lalu, jika saya menemukan perbuatan hoaks tentu akan mengingatkan, namun kalau sudah diingatkan masih tetap begitu, langkah terakhir mungkin akan melaporkan ke bagian terkait.





Maria Fertinia Jija - Resepsionis

Untuk saya netral berarti tidak berpihak kepada sesuatu dan siapapun. Tapi saya belum tahu kalau ternyata netral bisa ditunjukkan juga dengan tidak berpose dengan gaya tertentu. Namun saya tahu kalau ada informasi hoaks seputar Pemilu, Saya tidak akan mudah percaya dan cari tahu dulu kebenarannya.

Afif Nur Rakhman - Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika

Untuk saya netral berarti tidak berpihak kepada sesuatu dan siapapun. Tapi saya belum tahu kalau ternyata netral bisa ditunjukkan juga dengan tidak berpose dengan gaya tertentu. Namun saya tahu kalau ada informasi hoaks seputar Pemilu, Saya tidak akan mudah percaya dan cari tahu dulu kebenarannya.



Muhammad Scessardi Kemalsyah - Tim Substansi Menteri dan Wakil Menteri



Menurut aku, netral itu bukan berarti gak punya pilihan, Aku tetap punya pilihan kandidat politik. Tapi aku tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat secara terang-terangan dan tidak berusaha mempengaruhi orang lain untuk mengikuti pilihan aku. Sejak awal ada arahan tentang larangan berpose dengan gaya tertentu, aku tidak pernah lagi bergaya seperti itu. Untuk informasi hoaks seputar Pemilu, Aku pasti akan cari tahu dulu kebenarannya. Apalagi kalau kontennya mengandung kata-kata yang bombastis aku pasti akan lebih hati-hati. Kalau ternyata hoaks, aku berusaha tidak akan menyebarkan dan mendukung teman-teman untuk tidak mudah percaya hoaks.

Indra Maulana - Seditjen PPI

Arti netral bagi saya sebagai ASN adalah tidak memberikan dukungan baik kepada paslon capres, calon kepala daerah, maupun kepada partai politik yang terlibat dalam kontestasi Pemilu. Selain itu sosialisasi mengenai larangan menunjukkan gesture tertentu juga sudah ada, sehingga sebagai ASN kita juga harus mematuhi. Adapun jika ada hoaks terkait Pemilu, saya pasti akan memfilter informasi tersebut dan tidak langsung percaya. Biasanya informasi yang bersifat agresif, tidak disertai sumber, dan menyajikan data yang bombastis kita bisa cek kebenarannya di sumber yang valid.



#PemiluDamaiPedia





ADU JURUS MENARIK SIMPATI

Hajatan demokrasi lima tahunan di Indonesia bakal berlangsung di tahun 2024 ini. Dalam perhelatan politik ini, seluruh masyarakat diharapkan dapat ikut serta memberikan hak suara untuk bisa bersama-sama menentukan pemimpin bangsa yang akan menentukan nasib negara ke depannya. Pemilu 2024 menjadi pemilihan umum langsung kelima sejak digelar pada 2004. Deklarasi kampanye damai menandai awal mula masa kampanye Pilpres 2024 yang dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.



Pelaksanaan Pemilu 2024 terbagi dalam dua tahap. Tahapan pertama, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) yang diadakan pada 14 Februari 2024. Melalui Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 menetapkan 24 Partai peserta pemilu 2024 terdiri dari 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Selanjutnya, tahapan kedua, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada 27 November 2024.



Setiap peserta Pemilu melakukan kampanye yang merupakan tahapan awal dalam ajang Pemilu, baik itu pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif. Sampai saat ini rivalitas para bacaleg atau bacapres sangat terasa dalam perang alat peraga kampanye (APK) ditempat-tempat yang memungkinkan bisa dilihat oleh orang banyak. Tidak aneh jika jauh hari sebelumnya di area ruang publik sangat masif dan banyak sampah visual iklan politik.



Kehadiran teknologi informasi menegaskan berkembangnya model kampanye politik, di era digital membuat beralih dari konvensional ke digital termasuk aktivitas politik. Kampanye dalam platform digital bisa menjadi kreatif, bertujuan membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diingat dan diterima oleh publik. Kampanye virtual bisa menjadi pilihan, dimana pemilih dapat dengan mudah melihat visi misi calon.



Things left Behind

Hal-hal yang Kita Pelajari dari Mereka yang Telah Tiada

oleh **Nur Sholekhatun Nisa**

Apa yang ada di benak anda ketika mengingat tentang kematian? Pernahkah anda berfikir bagaimana seseorang menghadapi kematiannya? Bagaimana kisah sesungguhnya di balik kematian seseorang?

Sebagian dari kita mungkin akan menghindari pembicaraan atau pembahasan yang berhubungan tentang kematian karena ketidaksiapan kita dalam menghadapi kematian. Padahal, kematian adalah suatu hal yang pasti dan tidak bisa kita hindari karena pada dasarnya kita semua akan menghadapinya.

Namun, meski kematian adalah hal yang pasti, ada pula orang-orang yang memilih menjemput kematiannya sendiri lebih cepat tanpa menunggu waktu yang tepat. Mereka yang merasa telah sampai di titik akhir sebelum tiba gilirannya dan meninggalkan segala urusannya begitu saja. Baik kematian dihadapi secara natural maupun tidak, mereka yang pergi adalah orang-orang yang telah menuntaskan tugasnya di dunia.

Ada banyak kisah di balik cerita tentang kematian seseorang. Buku **Things Left Behind** karya Kim Sae Byoul dan Jeon Ae Won, merupakan buku yang mengangkat berbagai macam latar belakang kematian seseorang yang ditulis berdasarkan sudut pandang para pekerja yang mengurus barang-barang peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Baik mereka yang meninggal karena sebab natural, maupun yang tidak (pembunuhan atau bunuh diri).

Buku ini terdiri dari empat bagian dengan sub judul; Seandainya Mereka Lebih Saling Mengasihi; Seperti Apa pun Hidup Kita, Kita Berharga; Harapan yang Muncul di Titik Terendah; dan Yang Tersisa dalam Hidup Pada Akhirnya. Masing-masing bagian mengulik bagaimana kisah-kisah sesungguhnya di balik kematian seseorang serta makna hidup yang dapat dipelajari dari jejak hidup mereka yang telah tiada.

Kematian hanyalah sepenggal dari alam semesta. Sebenarnya, tidak ada yang baik atau buruk. Demikian pula hidup dan mati. (hal 16)

Kehidupan adalah hal yang berharga. Melalui kaca mata para pekerja di bidang ini, kita bisa melihat banyak hal yang selama ini tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Penulis mengajak pembaca melihat sisi lain dari sebuah kematian dengan memberi ingatan yang membekas pada kita, sebuah gambaran bagaimana kita seharusnya sebagai manusia yang masih hidup menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya.

Sejak awal, buku ini telah menyuguhkan kisah-kisah kematian yang memilukan. Cerita kematian pembuka bergulir dari seorang pemuda yang memilih menyerah pada kehampaan dan mengakhiri hidupnya, padahal ia adalah harapan terbaik orang tuanya. Kisah tersebut menjadi salah satu kematian orang-orang yang jauh dari kasih sayang dan menjadi bencana ketika seseorang tak mampu bertarung dengan dirinya sendiri.

Yang menyayat hati, banyak kisah kematian tentang kesepian yang dialami. Dimana seseorang meninggal sendirian tanpa ada yang mendampingi, seperti kisah dari seorang ayah yang merindukan kehangatan keluarga serta menderita kesepian hingga memilih bunuh diri, juga kisah jenazah seorang nenek yang baru ditemukan beberapa hari oleh anggota keluarganya sendiri padahal mereka hidup dalam satu rumah.

Book Review



Judul :
Things Left Behind

Penulis :
Kim Sae Byoul dan Jeon Ae Won

Alih Bahasa :
Anna Lee

Penerbit :
PT Gramedia Pustaka Utama

Jumlah Halaman :
+ 199 Halaman

ISBN :
9786020657516

Ada pula kisah yang membuat kita ikut kesal dan marah seperti kisah tentang para anak yang lebih mengutamakan mencari harta warisan orang tuanya ketimbang membereskan lebih dulu barang-barang peninggalan jenazah orangtuanya, seorang lelaki yang tega membakar rumah mantan pacarnya dan menewaskan anggota keluarganya dengan tragis, juga kisah seorang anak yang membunuh ibu kandungnya sendiri karena merasa lelah terus dituntut menjadi juara satu sepanjang hidupnya.

Setiap kisah yang diceritakan membekas di kepala pembaca sekaligus menjadi perenungan bagi kita akan kematian. Beberapa kisah kematian juga dapat membuat perut mual ketika membaca detailnya. Sehingga perlu jeda khusus untuk bisa memahami setiap jengkal kronologi yang ditulis oleh petugas berdasarkan kondisi di lapangan.

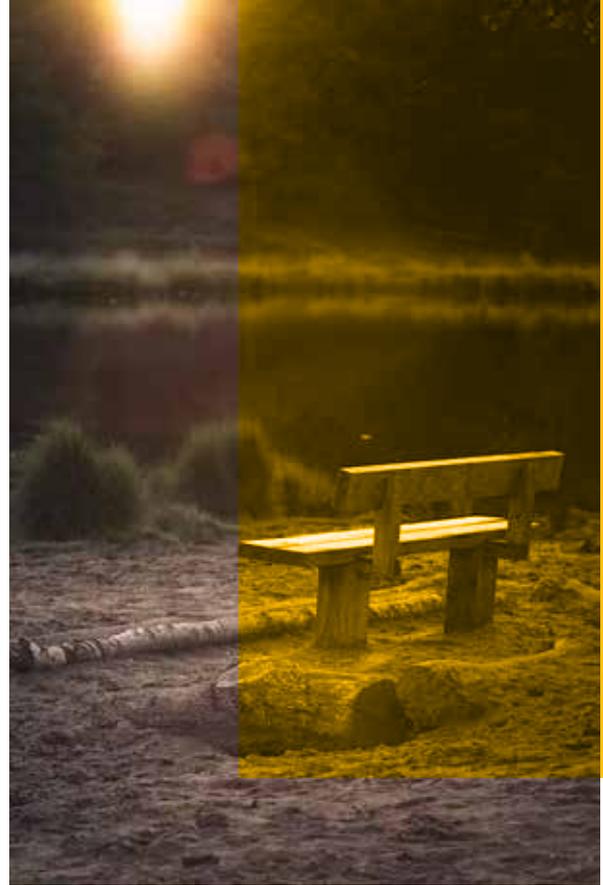
Dari banyaknya kasus kematian yang diceritakan, kematian sebab kesepian menjadi hal paling sering ditemui dalam buku ini. Disusul dengan kematian karena disebabkan oleh kesulitan ekonomi dan kemiskinan, ketidakpedulian antar sesama manusia terutama dalam lingkaran keluarga, serta kegagalan menata diri sendiri dalam menjalani

kehidupan yang sulit. Beberapa orang memilih melakukan mengakhiri hidupnya sendiri dengan alasan kematian lebih mudah dibandingkan kehidupan yang telah ia jalani.

Penulis juga menekankan tentang pentingnya perhatian kecil yang bisa kita lakukan kepada sesama manusia, terutama untuk orang-orang di sekeliling kita. Sebab barangkali saja, perhatian kecil itu bisa menjadi harapan bagi seseorang untuk mendapatkan kembali semangat hidupnya. Seperti yang tertulis dalam buku, 'sebenarnya, bunuh diri dan kematian seorang diri dalam kesepian adalah pembunuhan lain yang diakibatkan oleh ketidakpedulian kita' (hal 138).

Di zaman ketika mungkin di antara kita sudah tak lagi saling peduli dengan kehidupan masing-masing, setidaknya kita menyadari bahwa kehidupan bagi diri sendiri adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika tak ada tempat bagi kita untuk bergantung, maka menyerah dan mengakhiri hidup bukanlah jalan satu-satunya. Kita-lah yang harus merawat dan bertanggung jawab atas kehidupan yang tengah kita jalani.

Kematian seorang diri dalam kesepian tanpa ada yang mendampingi bukan menunjukkan bahwa dia mati dalam kesepian, melainkan menunjukkan bahwa dia hidup dalam kesepian. (hal 127)



Hidup adalah berkat dan mukjizat. Keberadaan kita adalah peristiwa yang paling istimewa sejak alam semesta ini diciptakan. Kita lahir ke dunia ini berarti kita telah dipilih oleh yang Mahakuasa. (hal 122)

Meski diceritakan dari sudut pandang penulis sebagai renungan personal dari pengalaman pribadinya, buku ini mampu menyadarkan kita akan pentingnya hal-hal yang selama ini luput dari perhatian, seperti betapa berharganya kehidupan, keluarga, persahabatan, kesetiaan serta kasih sayang yang diberikan oleh sesama makhluk hidup.

Melalui perenungan-perenungan penulis dalam setiap menyelesaikan pekerjaannya, kita seolah diajak masuk untuk ikut meresapi setiap kisah yang ia bagikan. Ada jeda yang harus kita siapkan untuk memahami dan menilai pelajaran hidup seperti apa yang bisa kita maknai ketika selesai membaca satu perjalanan mereka dalam mengantar orang-orang pada kematiannya.

Kematian tidak mengenal waktu, oleh karena itu, pekerjaan ini tidak mengenal akhir pekan. Itulah kesulitanku. (hal 38)



Meski diceritakan dari sudut pandang penulis sebagai renungan personal dari pengalaman pribadinya, buku ini mampu menyadarkan kita akan pentingnya hal-hal yang selama ini luput dari perhatian, seperti betapa berharganya kehidupan, keluarga, persahabatan, kesetiaan serta kasih sayang yang diberikan oleh sesama makhluk hidup.

Melalui perenungan-perenungan penulis dalam setiap menyelesaikan pekerjaannya, kita seolah diajak masuk untuk ikut meresapi setiap kisah yang ia bagikan. Ada jeda yang harus kita siapkan untuk memahami dan menilai pelajaran hidup seperti apa yang bisa kita maknai ketika selesai membaca satu perjalanan mereka dalam mengantar orang-orang pada kematiannya.



Sudut pandang menarik juga bisa kita lihat dari bagaimana orang lain memandang pekerjaan satu ini. Ada hal-hal ironi yang turut serta mengiringi perjalanan mereka dalam mengemasi barang-barang yang ditinggalkan mendiang.

Dianggap sebagai pekerjaan yang tak biasa, mereka juga harus memastikan pekerjaannya tidak mengganggu orang lain, meminimalisir protes dari klien yang menggunakan jasanya, serta mengupayakan pekerjaan terbaik di segala kondisi yang kadang menyulitkan. Tak jarang mereka juga mendapat pandangan negatif dari orang-orang di sekitarnya. Pandangan buruk ditujukan baik pada profesi, maupun pilihan personal individu untuk bekerja di bidang tersebut.

Penulis benar, tujuan buku ini bukan untuk memperkenalkan pekerjaan unik dalam membereskan barang-barang peninggalan orang yang telah tiada, tapi berbagi cerita dan pengalaman dengan pembaca bahwa di sekitar kita banyak kematian menyedihkan yang tidak kita ketahui.

Kuharap pekerjaan membereskan barang-barang peninggalan orang meninggal ini pun tidak dianggap asing lagi. Kami menghapus jejak darah, kenangan menyakitkan bagi almarhum, dan kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Kami adalah orang-orang yang membantu almarhum pindah ke surga. (hal 80)

Kelebihan dari buku ini adalah penggunaan bahasa oleh penulis yang sangat mudah dipahami dan dicerna. Begitu mengalir dan menyentuh. Tidak berbelit-belit namun makna yang dalam sampai ke pembaca dengan baik. Kesederhanaan kata justru memuat banyak pesan yang disampaikan dan membuat siapa pun pembacanya tergugah.

Dengan penyampaian yang apa adanya, buku ini memberi kita banyak harapan tentang menjalani kehidupan dengan belajar dari cerita-cerita tentang kematian itu sendiri. Penulis dengan segala pengalaman kerjanya sangat kompeten dalam menjabarkan detail dengan baik, sehingga sebagai pembaca kita akan turut larut pada setiap cerita yang ditulis. Hal tersebut yang kemudian membuat pembaca secara tidak sadar dapat menyelesaikan buku yang tebalnya kurang lebih 200 halaman ini dengan mudah.



Sementara itu, di balik banyaknya kelebihan yang dimiliki, buku ini memiliki beberapa celah. Salah satunya isi cerita, kronologis, deskripsi keadaan dengan detail yang terlalu mengganggu bahkan dapat membuat mual ketika dibayangkan. Kemudian ada beberapa cerita pada buku ini yang sangat tidak direkomendasikan bagi kita yang sedang merasa tidak baik-baik saja secara mental. Tidak bisa dipungkiri, bahwa di balik tujuan pembuatan buku ini untuk memberikan nilai yang baik bagi kehidupan, juga menyimpan cerita-cerita gelap yang dapat mengganggu batin seseorang. Sehingga membaca buku ini harus menyiapkan diri terutama kesiapan mental untuk dapat larut dalam berbagai kisah kematian yang disuguhkan.

Kuharap dunia tempat kita hidup ini menjadi dunia yang baik untuk menjalani kehidupan bagi siapapun. (hal 94)



Portal Kominfo

Siaran Pers No. 11/HM/KOMINFO/01/2024

Selasa, 9 Januari 2024

tentang

Apresiasi Satgas Anti Hoax PWI Pusat, Menkominfo Ajak Kolaborasi Tangani Hoaks Pemilu



Menkominfo Budi Arie Setiadi bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendri CH Bangun dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam acara Kick Off Satgas Anti Hoax di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (09/01/2023). Satgas Anti Hoax menjadi wujud komitmen PWI Pusat membantu pemerintah dan masyarakat memerangi hoax selama Pemilu 2024. - (PeyHS)

Penyebaran informasi yang mengandung hoaks dalam setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengapresiasi pembentukan Satgas Anti-Hoax oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

“Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan bukti nyata partisipasi profesi wartawan dalam melawan hoaks, tetapi juga menunjukkan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat,” ungkapnya dalam Kick Off Satgas Anti Hoax PWI Pusat di Jakarta Pusat, Selasa (09/01/2024).

Menkominfo mengajak Satgas Anti Hoax PWI Pusat berkolaborasi dalam melawan hoaks. Bahkan mendorong satgas menjadi bagian dari

upaya Kementerian Kominfo menangani hoaks dari tingkat hulu yaitu peningkatan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital. Selanjutnya pada tingkat menengah yang meliputi proses validasi fakta dan informasi serta pemutusan akses konten hoaks. Dan pada tingkat hilir yaitu dukungan terhadap penegakan hukum.

“Program-program kerja Satgas Anti Hoax yang selaras dengan inisiatif Kominfo. Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan penanganan

isu hoaks terkait Pemilu, baik melalui upaya kontra narasi maupun take-down konten hoaks,” jelasnya.

Menteri Budi Arie mencontohkan isu yang beredar seperti “KPU Mengubah Format Debat Capres-Cawapres Menjadi Tanpa Penonton”, “Tiga KTP dan NPWP Diduga Milik Seorang Warga Negara

Tionghoa untuk Partisipasi Pemilu”, dan video tentang “Uang Suap dari Kelompok Komunis untuk Kecurangan Pemilu”.

“Upaya kontra narasi dilakukan oleh Kementerian Kominfo, guna menanggulangi isu-isu tersebut demi memastikan informasi yang beredar tetap faktual,” tandasnya.

Siaran Pers No. 13/HM/KOMINFO/01/2024

Selasa, 9 Januari 2024

tentang

Percepat Penerapan Digital ID, Menkominfo: Ekosistem Sudah Siap!



Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan transformasi dan layanan pemerintahan berbasis digital. Secara khusus kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Presiden meminta segera mempercepat pengembangan dan penerapan Digital ID.

“Bapak Presiden meminta paling lambat bulan 6 harus sudah selesai,” ungkapnya usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Peningkatan Kinerja ASN melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara Jakarta Pusat, Selasa (09/01/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan Kementerian Kominfo sudah siap melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ekosistem untuk penerapan Digital ID sudah siap.

"Pemerintah sudah siap. Karena integrasinya sudah, platform nya, terus aplikasinya, juga tentang arsitektur digitalnya. Secara konsep sudah rapi, tinggal bagaimana menyatukan semua kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah," jelasnya.

Menkominfo menjelaskan percepatan penerapan Digital ID secara keseluruhan hingga implementasinya ditargetkan pada September 2024.

Sementara jangka waktu 6 bulan merupakan target penyelesaian sistem.

"(Target penyelesaian) Digital ID sampai September 2024, supaya kalian punya identitas digital. Target 6 bulan sesuai arahan Presiden Jokowi itu sistemnya paling nggak sudah terjadi, dipercepat," tuturnya.

Siaran Pers No. 12/HM/KOMINFO/01/2024

Selasa, 9 Januari 2024

tentang

Menteri Budi Arie: Kominfo Dukung Penuh Transformasi Data Kependudukan Berbasis Digital



Pemerintah tengah melakukan percepatan transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan komitmen dan dukungan penuh dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID (Identitas Kependudukan Digital/IKD), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik.

"IKD itu tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri sama Kominfo. (Tujuannya) bagaimana NIK kita ditransformasi ke Digital ID," tuturnya usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Peningkatan Kinerja ASN melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara Jakarta Pusat, Selasa (09/01/2024).

Menkominfo menjelaskan saat ini Pemerintah sedang melakukan migrasi dan pendataan identitas kependudukan dari KTP elektronik ke IKD digital berbasis aplikasi.

"Nanti kita lihat prosesnya, karena baru proses pendataan. Sekarang sudah 10 juta yang sudah switching juga ke identitas digital. Kita kan ada 280 juta semua punya NIK, itu ditransformasi ke digital sehingga tidak perlu lagi bawa KTP, tinggal pakai handphone, QRIS dan sebagainya," tuturnya.

Menurut Menteri Budi Arie transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, penggunaan identitas kependudukan juga akan terjadi perubahan karena pesatnya perkembangan teknologi.

"Belum semuanya (peralihan identitas kependudukan dari KTP ke IKD), nanti transformasi jalan. Pasti KTP lama sudah pasti dengan sendirinya berakhir, pasti *game over* juga. Cuma menunggu semuanya punya," ungkapnya.

Menkominfo menjelaskan peralihan KTP ke IKD membutuhkan proses integrasi sehingga masyarakat penerima program pemerintah seperti bantuan sosial, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan, akan lebih mudah diakses.

Siaran Pers No. 04/HM/KOMINFO/01/2024

Rabu, 3 Januari 2024

tentang

Menteri Budi Arie: Kominfo Siapkan Infrastruktur Percepat Transformasi Digital Nasional



Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Lewat Perpres itu, Pemerintah memadukan layanan digital nasional melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas dengan menyediakan infrastruktur digital.

"Kominfo siap melaksanakan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional sebagaimana amanat Perpres 82 Tahun 2023. Termasuk melalui dukungan infrastruktur digital yang ada, termasuk jaringan pita lebar dan Pusat Data Nasional," ungkapnya dalam pertemuan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (03/01/2024).

Percepatan transformasi digital nasional menjadi fokus perhatian penting dalam Visi Indonesia Digital 2045 yang telah diluncurkan Kementerian Kominfo belum lama ini. Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo siap bersinergi dengan Kementerian PANRB untuk mempercepat transformasi digital tanah air.

"Sejalan dengan Visi Indonesia Digital 2045, dalam rangka percepatan transformasi digital, Kominfo siap mendukung KemenPANRB dan akan bekerja sama lebih erat lagi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing," tuturnya.

Siaran Pers No. 08/HM/KOMINFO/01/2024

Minggu, 7 Januari 2024

tentang

**Wamen Nezar Patria Ajak Dayah dan Santri Hadirkan
Pemilu Damai 2024**



Peningkatan literasi digital menjadi salah satu kunci untuk menghadirkan rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang damai dan aman. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan kemampuan berpikir kritis dan bijak dalam pemanfaatan teknologi makin dibutuhkan seluruh elemen masyarakat termasuk Dayah.

“Dengan tantangan polarisasi serta perpecahan yang dapat timbul akibat hoaks dan disinformasi,” tandasnya dalam Seminar Literasi Digital HUT ke-36 Dayah Jeumala Amal yang berlangsung daring, Minggu (07/01/2024).

Oleh karena itu, Wamenkominfo mengharapkan Dayah Jeumala Amal berperan aktif mencegah disinformasi politik, mendukung kampanye anti-hoaks.

“Edukasi sivitas akademik serta lingkungan sekitar dengan mencari informasi valid dari sumber kredibel, membantu edukasi kelompok yang sulit mengakses informasi, serta melakukan amplifikasi pesan Pemilu Damai 2024,” tuturnya.

Wamen Nezar Patria juga mengajak seluruh elemen

Dayah mengambil peran dalam kampanye Pemilu Damai 2024.

“Dengan menggunakan media sosial maupun Internet secara cerdas dan bijak, khususnya dengan mengakses dan menyebar konten positif di ruang digital,” ungkapnya.

Menjelang Pemilu 2024 yang tersisa hanya sekitar satu bulan lagi, Wamenkominfo Nezar Patria mengajak setiap warga menahan jempol dan jari kita ketika menerima suatu informasi.

“Pahami dulu dan pelajari, jika tidak bermanfaat atau bahkan bermuatan negatif, jangan disebar. Ayo bersama – sama kita tingkatkan literasi digital, sebagai kontribusi kita mewujudkan pemilu damai,” tegasnya.

Siaran Pers No. 07/HM/KOMINFO/01/2024

Minggu, 7 Januari 2024

tentang

Tingkatkan Literasi Digital, Kominfo Latih Lebih dari 24 Juta Orang



Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat. Sebanyak 24.640.451 orang telah mengikuti peningkatan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sejak 2017.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan GNLD memperkuat kecakapan digital dasar masyarakat dalam mencegah penyebaran konten negatif, serta menciptakan ruang digital yang produktif.

“Bersama dengan 142 mitra dari berbagai latar belakang seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil, kegiatan literasi digital telah diikuti hingga 24.640.451 peserta di seluruh Indonesia hingga akhir 2023,” ungkapnya dalam Seminar Literasi Digital HUT ke-36 Dayah Jeumala Amal yang berlangsung daring, Minggu (07/01/2024).

Melalui Program Literasi Digital, Kementerian Kominfo mendorong seluruh masyarakat untuk meningkatkan kecakapan pemanfaatan teknologi digital khususnya pada empat pilar literasi digital yang meliputi, digital skills, digital safety, digital culture, dan digital ethics.

“Keempat pilar tersebut disampaikan melalui berbagai modul dan kegiatan seminar, workshop serta pengajaran lain yang dilakukan oleh GNLD yang terbuka untuk umum,” ujar Wamen Nezar Patria.

Wamenkominfo menekankan literasi digital memiliki manfaat mulai dari peningkatan adopsi teknologi dalam layanan publik, kegiatan ekonomi,

inklusi digital dan partisipasi demokrasi masyarakat, serta mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia, ekonomi.

“Namun, pekerjaan rumah kita masih cukup banyak. Di tahun 2022, tingkat literasi digital Indonesia masih berada di angka 3.54 dari 5.00 atau tingkat sedang,” jelasnya.

Kolaborasi

Menurut Wamen Nezar Patria, upaya peningkatan literasi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti akses infrastruktur digital yang belum merata, arus informasi yang meningkat, kesadaran pentingnya literasi digital masih rendah, hingga maraknya konten negatif serta hoaks makin marak.

“Sepanjang tahun 2018 sampai 6 Januari 2024 Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan *take down* terhadap 4.506.749 konten negatif, serta khusus untuk hoaks, kami telah menerbitkan klarifikasi terhadap 928 isu hoaks pemilu dalam periode yang sama,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wamen Nezar Patria berharap sivitas akademika Dayah Jeumala Amal dapat memanfaatkan secara optimal inisiatif literasi digital yang ada.



Siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2024**Rabu, 3 Januari 2024****tentang****Jaga Ruang Digital, Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024**

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penanganan atas persebaran isu hoaks yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak 2024. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan hingga Selasa (02/01/2024) kemarin, telah menangani total 203 isu hoaks Pemilu.

"Hasil identifikasi terdapat 203 isu hoaks dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten," ungkapnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (03/12/2024).

Secara rinci, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi 1.325 konten di platform Facebook, 947 konten di platform X, 198 konten platform Instagram, 342 konten platform TikTok, 36 konten platform Snack Video dan 34 konten platform Youtube.

Menkominfo menyatakan telah mengajukan *take down* atau tindak lanjut terhadap 1.399 konten yang tersebar di platform digital tersebut.

"Dari total 2.882 konten sudah diajukan untuk takedown semua dan yang sudah di-take-down

sebanyak 1.399 konten dan sisanya 1.483 sedang ditindaklanjuti," tuturnya.

Menurut Menteri Budi Arie, isu hoaks mengenai Pemilu 2024 selama tahun 2023 terdapat sebanyak 189 isu.

"Peningkatan cukup signifikan pada bulan November s.d. Desember 2023, bersamaan dengan masa Kampanye Pemilu 2024," jelasnya.

Oleh karena itu, Menkominfo Budi Arie mengingatkan kepada semua pihak terutama kontestan Pemilu 2024 untuk ambil peran aktif dalam menjaga ruang digital aman dan nyaman selama Pemilu 2024.

Siaran Pers No. 22/HM/KOMINFO/01/2024

Jumat, 12 Januari 2024

tentang

Cegah Hoaks Pemilu 2024, Menkominfo Ajak Tanamkan Nilai Luhur Bangsa



Menkominfo Budi Arie Setiadi menghadiri Diskusi Demi Indonesia Cerdas Memilih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (12/01/2024). Menteri Budi Arie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menanamkan nilai luhur bangsa guna mencegah penyebaran informasi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian selama penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. - (PeyHS)

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menanamkan nilai luhur bangsa guna mencegah penyebaran informasi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian selama penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Menurutnya, dalam rangkaian tahapan Pemilu 2024 sampai saat ini, masih terjadi penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran hoaks yang dapat merendahkan martabat sesama anak bangsa.

"Karena merendahkan martabat orang lain tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan para *founding father* dan pendahulu kita," tuturnya dalam Diskusi Demi Indonesia Cerdas Memilih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (12/01/2024).

Menkominfo menjelaskan sebaran hoaks, fitnah dan ujaran kebencian berpotensi mencerdai demokrasi.

"Karena hoaks itu punya saudara kandung namanya fitnah, terus dia punya adik namanya ujaran kebencian. Jadi hoaks, fitnah, ujaran kebencian itu adik kakak dan dia punya saudara sepupu yang namanya merendahkan martabat orang lain," tuturnya.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo telah melaksanakan berbagai strategi komunikasi publik guna menyebarkan berbagai informasi terkait Pemilu 2024. Bahkan, Kementerian Kominfo juga mendorong Kampanye Pemilu Damai untuk menyukseskan Pemilu 2024.

“Melalui media sosial dan berbagai macam kanal komunikasi, kami terus melakukan amplifikasi pesan Pemilu Damai 2024 untuk menjaga situasi terus kondusif. Kementerian Kominfo juga berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis kampus, komunitas, media, dan bahkan operator telepon seluler,” jelas Menteri Budi Arie.

Salah satu hasil kolaborasi Kementerian Kominfo dengan mitra strategis berupa kegiatan literasi digital dan diseminasi informasi penggunaan media sosial di masa Pemilu. Menurut Menkominfo, kolaborasi itu berperan penting dalam mencegah sebaran konten negatif, termasuk hoaks.

“Kolaborasi ini kami yakin dalam mencegah masyarakat kita terpapar berbagai konten negatif di ruang digital. Khususnya adalah kekacauan informasi atau *information disorder* seperti misinformasi, disinformasi, dan malinformasi atau yang populer kita kenal dengan kata hoaks,” tuturnya.

Siaran Pers No. 25/HM/KOMINFO/01/2024

Jumat, 12 Januari 2024

tentang

Tangkal Hoaks Soal Pemilu 2024, Kominfo Gencarkan Tiga Inisiatif



Pelaksanaan pemungutan suara dalam rangkaian Pemilihan Umum tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 tinggal menghitung hari. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan masih menemukan penyebaran informasi hoaks dan disinformasi mengenai Pemilu dalam ruang digital. Mengutip hasil penelitian The Safer Internet Lab (SAIL) Tahun 2023, Menteri Budi Arie menyatakan lebih sebanyak 42% masyarakat Indonesia masih percaya disinformasi seputar Pemilu.

"Kemudahan mengakses informasi hoaks berpotensi negatif bagi kedamaian di sekitar kita. Jadi bayangkan masih ada 42% masyarakat yang percaya padahal itu hoaks, disinformasi," jelasnya dalam Acara Diskusi Demi Indonesia Cerdas Memilih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (12/01/2024).

Merespons situasi tersebut, Kementerian Kominfo menggencarkan tiga inisiatif program untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi berkaitan dengan Pemilu 2024.

"Pertama dari tingkat hulu melalui Program Gerakan Nasional Literasi Digital. Kami berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membentengi diri dari ancaman, menjadi korban dan penyebar hoaks di seluruh masyarakat," tutur Menkominfo.

Selanjutnya, pada tingkat menengah, Menteri Budi Arie memerintahkan jajaran untuk melakukan Patroli Siber selama 1x24 jam secara masif. Menurutnya, upaya membersihkan konten hoaks dan disinformasi bertujuan untuk mengamankan ruang digital dari virus hoaks.

"Manakala menemui konten negatif atau hoaks, langsung kami tindaklanjuti dengan men-takedown alias di-almarhum-kan dari ruang digital," ungkapnya.

Kementerian Kominfo juga berupaya melakukan penerbitan klarifikasi terhadap hoaks secara berkala. Menkominfo menyatakan setiap informasi yang tersebar di ruang publik dengan tendensi hoaks dan disinformasi diberikan stempel untuk mempertegas sekaligus pengingat agar masyarakat tidak ikut menyebarkan.





Tingkatkan Kompetensi Pegawai dalam Sertifikasi Operator Radio, Ditjen SDPPI Laksanakan Diklat Teknis Telekomunikasi Maritim

Bogor (SDPPI) – Ditjen SDPPI melaksanakan Diklat Teknis Telekomunikasi Maritim pada tanggal 8 hingga 12 Januari 2024 yang diikuti oleh delapan peserta serta dipimpin Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko. Pelaksanaan diklat bekerja sama dengan Lembaga Diklat REOR Binasena Maritime Training Centre.

Salah satu tugas dan fungsi utama Ditjen SDPPI dalam pelayanan publik bidang Sertifikasi Operator Radio adalah menyelenggarakan Ujian Negara Radio Elektronika dan Operator Radio (UN REOR) bagi Pelaut dan Ahli Nautika sejak tahun 1989. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam inovasi telah dilakukan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya dalam meningkatkan kualitas

Penyelenggaraan UN REOR dan layanan Sertifikasi REOR secara keseluruhan. Salah satunya yaitu penerapan UN REOR berbasis komputer atau CAT secara daring untuk menyediakan kecepatan, ketepatan, dan transparansi penilaian Ujian yang bersifat teoritis.

Dalam sambutannya, Direktur Operasi menyampaikan bahwa Diklat Teknis Telekomunikasi Maritim bagi pegawai Direktorat Operasi Sumber Daya esensinya adalah memberdayakan internal Ditjen SDPPI agar tidak bergantung pada pihak luar dalam pelaksanaan Ujian Negara REOR. Direktorat Operasi juga berterima kasih atas masukkan-masukkan dari Lemdik Bina Sena sejak tahun 2017 untuk meningkatkan kualitas UN REOR.



Kominfo Tingkatkan Literasi Digital untuk Tangkal Hoaks Pemilu 2024

Pringsewu, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika meningkatkan pelaksanaan kegiatan literasi digital menjelang Pemilihan Umum Serentak 2024. Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Slamet Santoso mengharapkan lewat literasi digital, semua elemen bangsa memiliki wawasan digital yang mumpuni dan mampu menangkal konten hoaks.

“Melalui literasi digital diharapkan mahasiswa bisa memahami digital safety dan meningkat keterampilan digitalnya. Dengan begitu, mahasiswa bisa membuat konten-konten positif untuk menanggulangi hoaks, judi online, ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024,” jelasnya dalam Seminar Nasional Literasi Digital Sektor Pendidikan: “Membangun Generasi Emas Cakap Digital” di Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung, Senin (15/01/2024).

Balmon Jayapura Musnahkan 63 Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Jayapura (SDPPI) – Balmon SFR Kelas II Jayapura menggelar acara Pemusnahan Perangkat Hasil Penertiban SFR Periode 2018 – 2023 di Wilayah Kerja Balmon SFR Jayapura, Kamis (11/01/2024). Acara ini menandai babak lanjutan dalam pelaksanaan Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Peserta pelaksanaan pemusnahan terdiri dari PPNS dan Personil Balmon SFR Kelas II Jayapura Ditjen SDPPI, 2 orang dari Polda Papua, 1 orang dari KSOP Jayapura, dengan turut serta mengundang pemilik perangkat yang dimusnahkan.

Pelaksanaan Pemusnahan Perangkat Hasil Penertiban SFR Periode 2018 – 2023 di Wilayah Kerja Balmon SFR Jayapura berlangsung secara hybrid yaitu online dan offline, diketuai oleh Kepala Balmon SFR Kelas II Jayapura Ditjen SDPPI, Rachim Pribadi. Kepala Balmon SFR Kelas II Jayapura mengingatkan pentingnya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dan dapat menimbulkan potensi *harmful* interferensi.



Truk Logistik Pemilu Terguling Tanpa Pengawal? Itu Hoaks!

Jakarta Pusat, Kominfo - Beredar konten unggahan video dalam pesan berantai lewat platform pesan instan WhatsApp. Konon, konten unggahan itu disertai dengan narasi "Aneh ya kok truk pengangkut surat dan kotak suara tanpa pengawasan dan pengawalan pihak aparat terkait, klo tidak karena kecelakaan mana ada yang tau masyarakat, pada akhirnya Allah membuka satu persatu niat busuk para penghianat bangsa setelah kasus surat suara di Taiwan".



Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari artikel berita cekfakta.tempo.co, klaim narasi pada unggahan video tersebut adalah keliru. Foto identik ditemukan pada artikel Radar Jogja yang diunggah pada 6 Januari 2024. Dalam keterangan berita disebutkan peristiwa itu adalah truk pengangkut logistik Pemilu yang terguling di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, 6 Januari 2024. Namun berita itu tidak mengatakan bahwa truk dijalankan tanpa pengawalan dalam peristiwa tersebut.

Fakta yang mendukung, truk itu sebetulnya telah mengikuti acara pelepasan di perusahaan percetakan Temprina di Kabupaten Semarang, kemudian mengirimkan logistik Pemilu ke Kabupaten Magelang dengan pengawalan mobil Patwal Polisi. Namun, terjadi kecelakaan yang menyebabkan truk terguling ke jurang.

Dirjen SDPPI : Berikan Kontribusi Terbaik Untuk Capai World Class Testing Laboratory

Depok (SDPPI) – Pembangunan Laboratorium Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sudah mencapai 92 persen dan akan rampung pada tahun 2024.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail melakukan kunjungan untuk melihat progres terakhir sebelum diresmikan, tidak sendiri Dirjen SDPPI ditemani oleh jajaran Eselon II di Ditjen SDPPI.



Dalam sambutannya Ismail menyampaikan kepada seluruh pegawai di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi untuk selalu memberikan kontribusi terbaik. "Saya minta totalitas dalam pekerjaan dan selalu memberikan yang terbaik" ucapnya, Senin (08/01/2024).

Awas Hoaks! KPU Susupkan 52 Juta Pemilih dalam DPS Pemilu 2024

Jakarta Pusat, Kominfo - Beredar cuplikan video dengan narasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusupkan 52 juta data pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Konon, video unggahan tersebut menyertakan keterangan "52 juta dari DPT Pemilu 2024, 205.853.518=25,26%, Ketua KPU yang melanggar kode etik harusnya dipecat. Data pemilu sumber manipulasi untuk kecurangan".



Hasil penelusuran TIM AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari cekfakta. tempo.com, hingga saat ini belum ada bukti adanya temuan penyusupan 52 juta data pemilih pada Pemilu 2024. Meskipun demikian, ada laporan dari Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu Jujur dan Adil (Jurdil) pada Juni 2023 tentang kecurigaan adanya 52 juta data pemilih yang tidak sesuai persyaratan.



Gelar Simposium Pengembangan AI, Ditjen SDPPI Tawarkan Konsep Unik dengan AI

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) saat ini sangat pesat, Direktorat Jenderal SDPPI melalui Direktorat Operasi Sumber Daya dalam kegiatan Simposium Pengembangan Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence (AI) bidang spektrum frekuensi radio telah membawakan konsep yang berbeda. Kegiatan Simposium yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Surabaya dikemas memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam bentuk pembawa acara (Master of Ceremony).

Pembawa acara tersebut bernama SAIDAH (SDPPI's Artificial Intelligence Digital Host). Tak hanya pembawa acaranya saja, pengiring lagu Indonesia Raya juga menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). Aspek digitalisasi juga diterapkan termasuk penggunaan QR Code untuk mengisi daftar hadir peserta serta pelaksanaan Quiz yang diadakan melalui online.

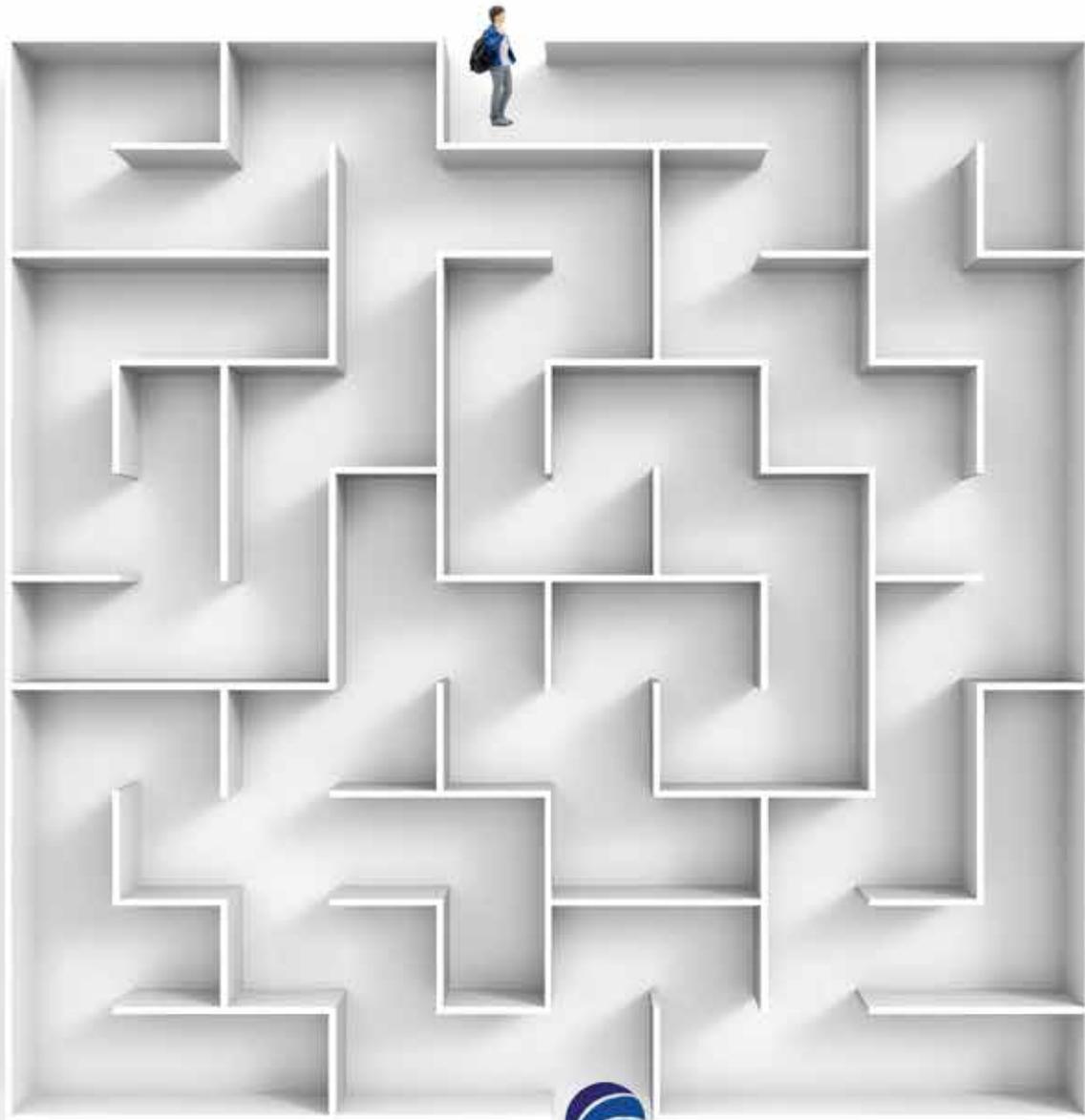


Feasibility Study Open RAN Di Indonesia Mulai di Awal Tahun 2024

Jakarta (SDPPI) – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Kominfo bersama USTDA, Telecom Infra Project (TIP), Telkom University, IBM, dan KCCTech melaksanakan kick off meeting pelaksanaan Feasibility Study Open RAN, Selasa (09/01/2024).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian hibah antara United States Trade and Development Agency (USTDA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah ditandatangani pada November 2023.

Teknologi RAN saat ini hadir sebagai platform perangkat keras dan perangkat lunak yang dibuat khusus berdasarkan standar global terbuka yang ditentukan oleh 3GPP. Open RAN dengan karakteristiknya yang bersifat “terbuka” memungkinkan peningkatan keragaman vendor dalam menyediakan solusi dan perangkat serta menghindari terjadinya vendor *locked-in*. Keberadaan Open RAN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi CAPEX dan OPEX pada penggelaran jaringan serta menjadi salah satu opsi dalam mengupayakan percepatan konektivitas digital di Indonesia.



Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment

Selamat Tahun Baru

1 Januari 2024

